

**ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

RISKA PUTRI AYU

21 0401 0009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

RISKA PUTRI AYU

21 0401 0009

Pembimbing:

Umar, S.E., M.S.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Putri Ayu
Nim : 21 0401 00019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sangsi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Riska Putri Ayu

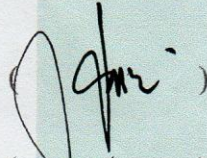
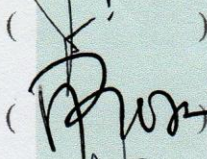
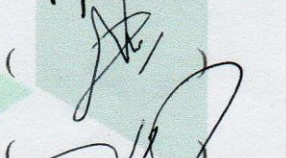
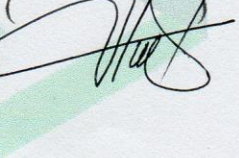
NIM. 21 0401 0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Pendidikan sebagai Variabel Moderasi di Indonesia yang ditulis oleh Riska Putri Ayu Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010009, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 17 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 25 Juli 2025

TIM PENGUJI

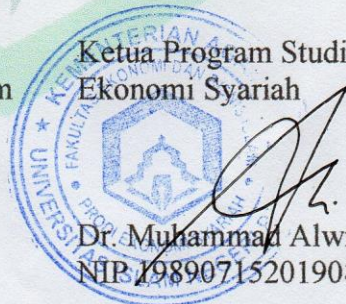
- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Rismayanti, S.E., M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Andi Nurrahma Gaffar, SE., M.Ak. | Penguji II | () |
| 5. Umar, S.E., M.SE. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy, M.E.I
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wat'ala* atas segala berkat rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Indonesia*” setelah melalui berbagai proses.

Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah (IAIN) Palopo.

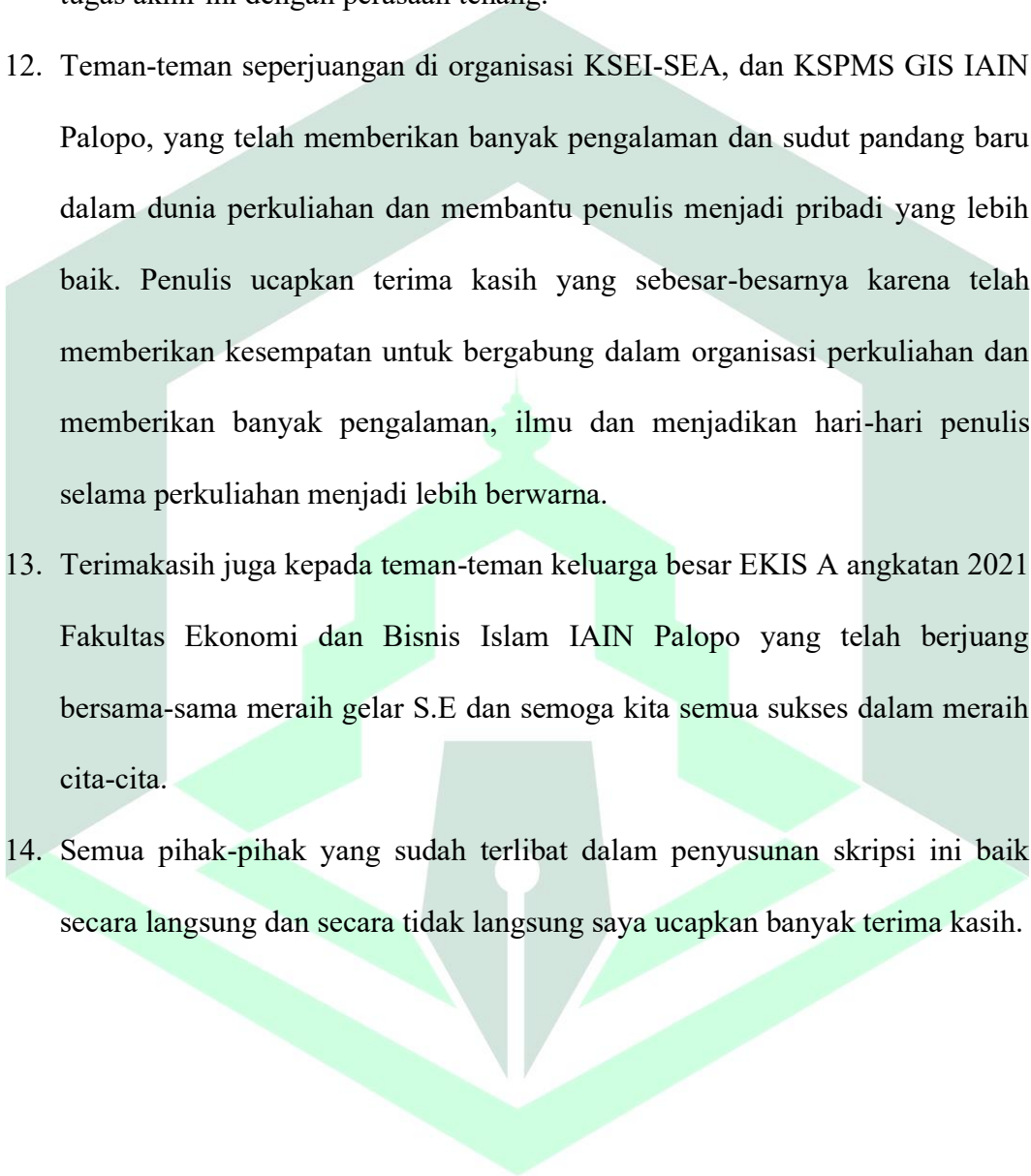
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Alm. Haripuddin dan Ibu Suarni. Terimakasih atas usaha, tetesan keringat dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terimakasih karena selalu mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang Allah berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan rintangan dan penuh dengan keterbatasan, tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis

untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada cinta pertama alm bapak saya, yang sudah meninggal belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat putri semata wayangnya menyelesaikan pendidikan terakhir dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Kepada orang terspesial belahan jiwa penulis Ibu saya berkat doa segala pengorbanan dan tulus kasih sayang sampai tak terhingga serta Saudara-saudara saya yang sangat berperan besar dalam memberikan semangat dan dukungan doa restu dalam penyelesaian skripsi ini. Terakhir, terimakasih yang begitu besar dari anakmu.

Begitupula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuff, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Perpustakaan IAIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

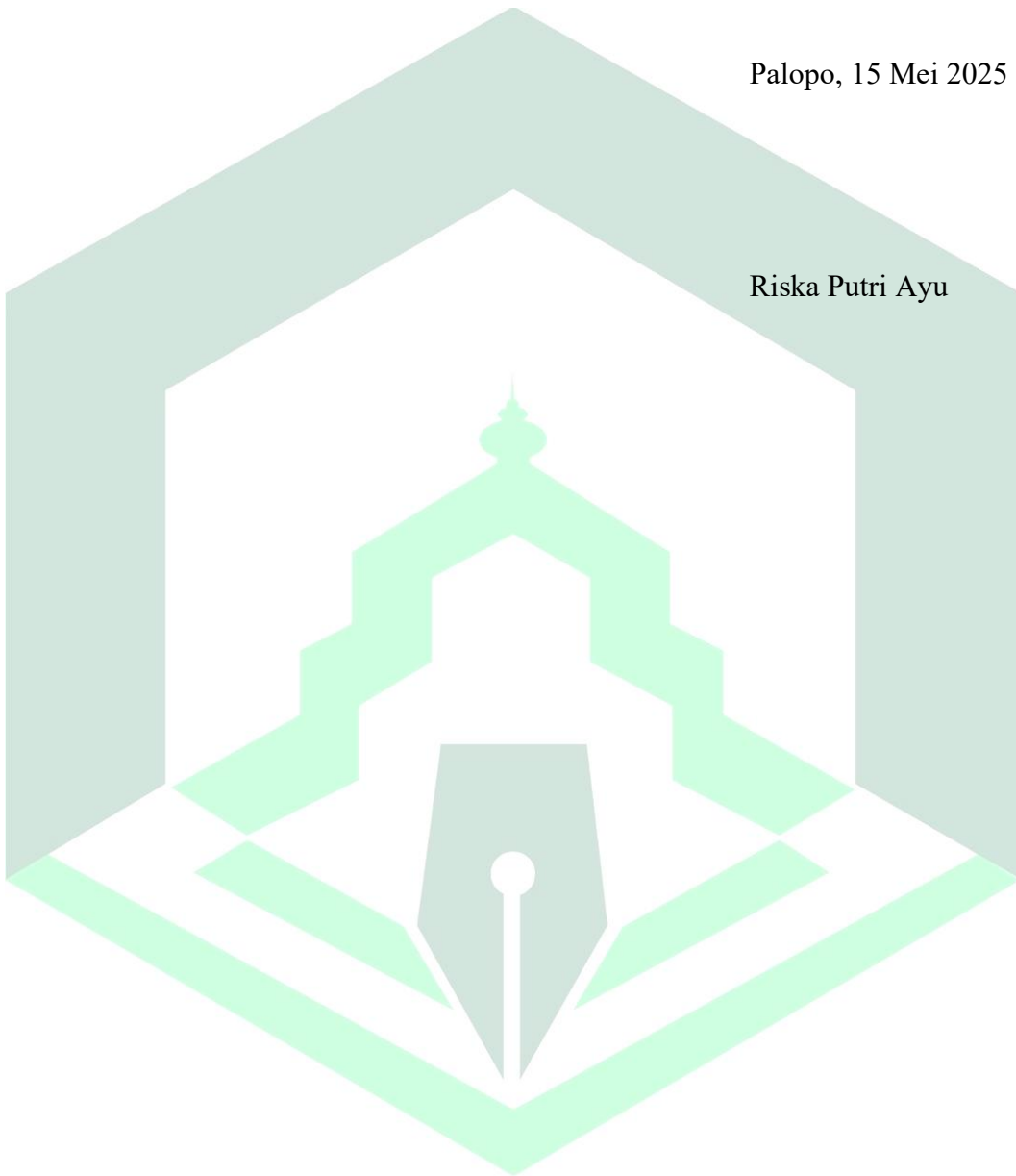
4. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M. EI selaku Ketua Program Ekonomi Syariah UIN Palopo, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Syariah beserta para Dosen dan Staff yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy., selaku Penasehat Akademik.
6. Umar S.E., M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Rismayanti, S.E., M.Si. dan Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat kosan terbaikku Nurul Khairiyah dan Kurnia Ningsih, yang suka protes dengan kesantiaian penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Tapi bagaimana pun terimakasih karena sudah mensupport dan tidak meninggalkan penulis di masa-masa yang sulit ini.
10. Sahabat Nurul Huda, yang sangat baik kepada penulis, teman tempat curhat, selalu membantu dan menjadi pendengar yang baik, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah menjadi keluarga, teman dan sahabat yang selalu ada semenjak dari semester 2 hingga saat ini yang sudah melewati masa-masa perkuliahan dengan sangat sabar.

- 
- The background of the text area features a large, light green watermark logo. It is a stylized emblem of IAIN Palopo, consisting of a central pentagon with a quill pen inside, surrounded by a series of concentric, angular lines that form a larger, more complex geometric shape.
11. Teman-teman KKN Integratif angkatan 26 desa Bangun Jaya, terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama 40 hari di bangun jaya dan dengan kekompakan bersama akhirnya bisa mendapatkan nilai A dan melanjutkan tugas akhir ini dengan perasaan tenang.
12. Teman-teman seperjuangan di organisasi KSEI-SEA, dan KSPMS GIS IAIN Palopo, yang telah memberikan banyak pengalaman dan sudut pandang baru dalam dunia perkuliahan dan membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan untuk bergabung dalam organisasi perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman, ilmu dan menjadikan hari-hari penulis selama perkuliahan menjadi lebih berwarna.
13. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar EKIS A angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
14. Semua pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan secara tidak langsung saya ucapkan banyak terima kasih.

Teriring doa yang tulus, semoga amal kebaikan dan keikhlasan pengorbanan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi agama, bangsa, dan negara.

Palopo, 15 Mei 2025

Riska Putri Ayu



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudhah al-athfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fādhilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعِمْ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah(az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terterletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subḥānahū wa ta’ālā

SAW = Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam

AS = ‘Alaihi al-Salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Kajian Teori.....	16
C. Kerangka Berfikir.....	41
D. Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Definisi Operasional Variabel	44
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48

G. Uji Asumsi Klasik	51
H. Uji Hipotesis.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Penelitian	55
B. Analisis Data	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Adz-Dzariyat/51: 19	2
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/9: 105	31



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 3. 2 Daftar 38 Provinsi Di Indonesia.....	43
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow	57
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman.....	58
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 6 Interpretasi Uji Glejser	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji dengan Durbin-Watson.....	63
Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial.....	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji Moderasi.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Output Uji Keseluruhan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gini Ratio	4
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	6
Gambar 2.1 Kurva Lorentz	24
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Peta Negara Indonesia.....	52
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Penelitian
- Lampiran 2 Tingkat Pengangguran Terbuka
- Lampiran 3 Gini Ratio
- Lampiran 4 Angka Melek Aksara
- Lampiran 5 Rata-rata Lama Sekolah
- Lampiran 6 Harapan Lama Sekolah
- Lampiran 7 Hasil Analisis Uji Penelitian



ABSTRAK

Riska Putri Ayu, 2025. “*Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Indonesia*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Umar

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan dan pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan jika dimoderasi oleh pendidikan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada kategori sedang, yang ditunjukkan oleh nilai Gini Ratio yang fluktuatif namun relatif stabil di kisaran 0,408 pada tahun 2015 hingga 0,381 pada tahun 2024, dan pengangguran yang signifikan sebagai salah satu penyebabnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sekunder menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* yaitu dari tahun 2015-2024. Pengumpulan data didapatkan dengan cara mengakses laporan tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan alat analisis Eviews 12 dengan uji statistik deskriptif, uji pemilihan model data panel, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi moderasi (*Moderating Regression Analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap ketimpangan di Indonesia. adanya pengaruh signifikan dari pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan jika dimoderasi oleh pendidikan. Artinya pendidikan dapat mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, Pendidikan

ABSTRACT

Riska Putri Ayu, 2025. “Analysis of the Effect of Unemployment on Income Inequality with Education as a Moderating Variable in Indonesia”. Thesis of the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Umar

This thesis discusses “Analysis of the Effect of Unemployment on Income Inequality with Education as a Moderating Variable in Indonesia” This study aims to determine: the effect of unemployment on income inequality and the effect of unemployment on income inequality if moderated by education. Income inequality in Indonesia is still in the moderate category, as indicated by the fluctuating but relatively stable Gini Ratio value in the range of 0.408 in 2015 to 0.381 in 2024, and significant unemployment as one of the causes.

This type of research is secondary research using quantitative methods. The object of this research is in Indonesia. This study uses time series data from 2015-2024. Data collection was obtained by accessing the annual report published by the Central Statistics Agency (BPS). The data obtained was then processed using the Eviews 12 analysis tool with descriptive statistical tests, panel data model selection tests, panel data regression tests, classical assumption tests, hypothesis tests and moderation regression tests (Moderating Regression Analysis).

The research results show a significant effect of unemployment on inequality in Indonesia. This finding suggests a significant effect of unemployment on income inequality when moderated by education. This means that education can influence the strength or direction of the relationship between unemployment and income inequality in Indonesia.

Keywords: Education, Income Inequality, Unemployment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini, masih termasuk negara berkembang dan sedang berusaha keras untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Artinya, terdapat sebagian kecil masyarakat yang sangat kaya, dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan.¹ Idealnya, hasil dari kegiatan ekonomi (seperti produksi barang dan jasa) bisa dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Jika pendapatan dibagi secara merata, maka kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Sehingga dalam kenyataan, pembagian tidak selalu adil. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan pendapatan.²

Ketimpangan pendapatan terjadi saat pendapatan yang diterima oleh masyarakat sangat berbeda jauh antara orang kaya dan orang miskin. Dalam ekonomi Islam, kondisi seperti ini tidak dibenarkan karena bisa menyebabkan jurang kesenjangan yang makin lebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Islam menekankan pentingnya berbagi, seperti perintah untuk

¹Nesha Rizky Ashari et al., “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 2 (December 23, 2024): 299, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139>.

²Darmuji Darmuji, Tuti Alawiyah, and Khuswatun Hasanah, *Dampak Kualitas Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi: Sebuah Analisis*, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 5, 2024, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i8.3183>.

menginfakkan harta, memberi makan orang miskin, dan membantu yang kekurangan.³

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti QS. Al-Hajj ayat 28, Al-Baqarah ayat 177, 184, 215, Al-Insan ayat 8, Al-Fajr ayat 13-14, dan Al-Maidah ayat 89, dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa disetiap harta kekayaan terdapat hak bagi orang miskin. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan, agar kesejahteraan bisa dirasakan lebih merata oleh semua orang.⁴

Kemudian firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat/51: 19)⁵

Menurut Faisal *et al* ada banyak cara untuk mengukur seberapa merata atau timpangnya pendapatan di suatu negara. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain: Koefisien Gini, ukuran dari Bank Dunia, indeks Theil, dan indeks-L. Akan tetapi yang paling umum dan sering dipakai adalah Koefisien Gini.

³ Istikharoh Istikharoh, Whinarko Juliprijanto, and Rian Destiningsih, "Education Level Impact Analysis, Minimum Wage And Unemployment Rate On Income Inequality In Special Territory Of Jogyaakarta, 2008-2018," *DINAMIC : Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2020): 109–25, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399>.

⁴ Muh Asy'ari Akbar and Hari Winarsa, "Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 75–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.70367/arraysiid.v2i2.21>.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahan (Adz-Dzariyat: 19)*, Kemenag Ri.

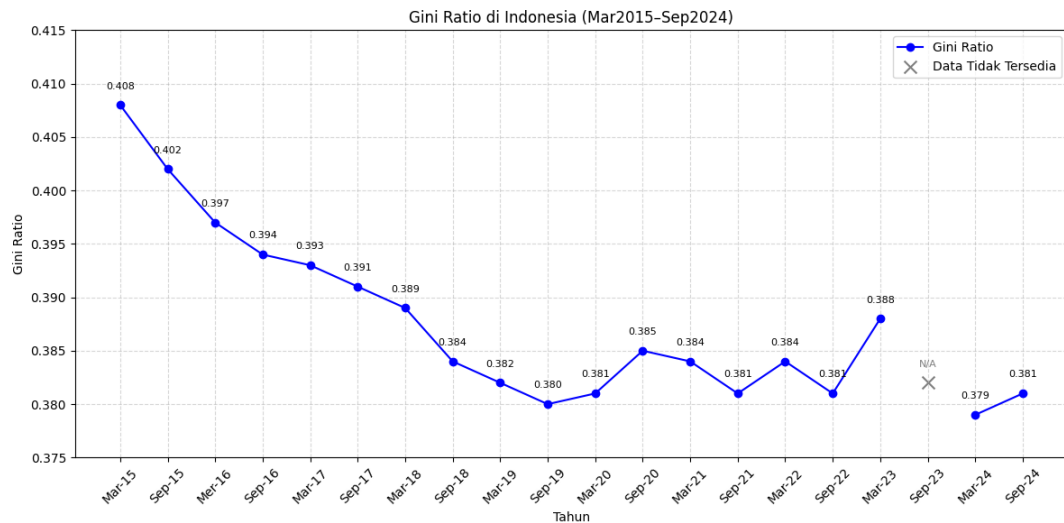
Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendapatan masyarakat, dapat dilihat dari data pengeluaran rumah tangga, yang diambil dari survei besar-besaran seperti Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).⁶ Sehingga dalam penelitian ini, yang digunakan adalah koefisien gini, karena cara ini cukup simpel dan bisa menunjukkan seberapa adil pendapatan dibagi ke masyarakat.⁷ Angka koefisien gini nilainya antara 0 sampai 1. Jika angkanya mendekati 0, artinya pendapatan dibagi merata ke semua orang. Namun jika angkanya mendekati 1, berarti terdapat ketimpangan yang tinggi, maka pendapatan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Nilai gini ratio dari beberapa negara berkembang berada pada kategori rendah (di bawah 0,4), sedang (antara 0,4 sampai 0,5), dan tinggi (di atas 0,5). Di Indonesia, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan nilai Gini Ratio sebesar 0,374, yang berarti masih berusaha menekan ketimpangan agar lebih merata dan adil.⁸

⁶ Faisal R Dongoran et al., “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1, no. 2 (2023): 198–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671>.

⁷ Marlince Tara Koj, Adrianus Kabubu Hudang, and Yuniarti Reny Renggo, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 1051–64, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2662>.

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*,” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020, n.d.), https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/dokren/narasi_rancangan_awal_rpjmn_2020_2024.pdf.



Gambar 1.1
Gini Ratio Di Indonesia Tahun 2015-2024

Dapat dilihat gambar 1.1 data dari Badan Pusat Statistik (BPS),⁹ nilai Gini Ratio di Indonesia dari Maret 2015 sampai September 2024 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan ketimpangan pendapatan secara bertahap. Pada Maret 2015, Gini Ratio tercatat sebesar 0,408 yang mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi 0,402 pada September 2015, dan terus mengalami penurunan secara konsisten hingga mencapai angka 0,394 pada September 2016. Selanjutnya, periode Maret 2017 hingga September 2018, Gini Ratio menurun lebih lambat dari 0,393 menjadi 0,384.

Pada tahun 2019, Gini Ratio mengalami sedikit penurunan dari 0,382 (Maret) menjadi 0,380 (September). Namun, pada tahun 2020, Gini Ratio kembali meningkat dari 0,381 (Maret) menjadi 0,385 (September). Pada tahun 2021 dan

⁹ Badan Pusat Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024* (Jakarta: Berita Resmi Statistik, 2025), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>

2022, Gini Ratio kembali mengalami penurunan secara bertahap dan stabil, bertahan pada angka 0,384 dan 0,381 secara konsisten pada Maret dan September. Namun, pada Maret 2023, Gini Ratio meningkat kembali menjadi 0,388. Pada September 2023 tidak tersedia dalam gambar yang ditandai dengan simbol “X”.

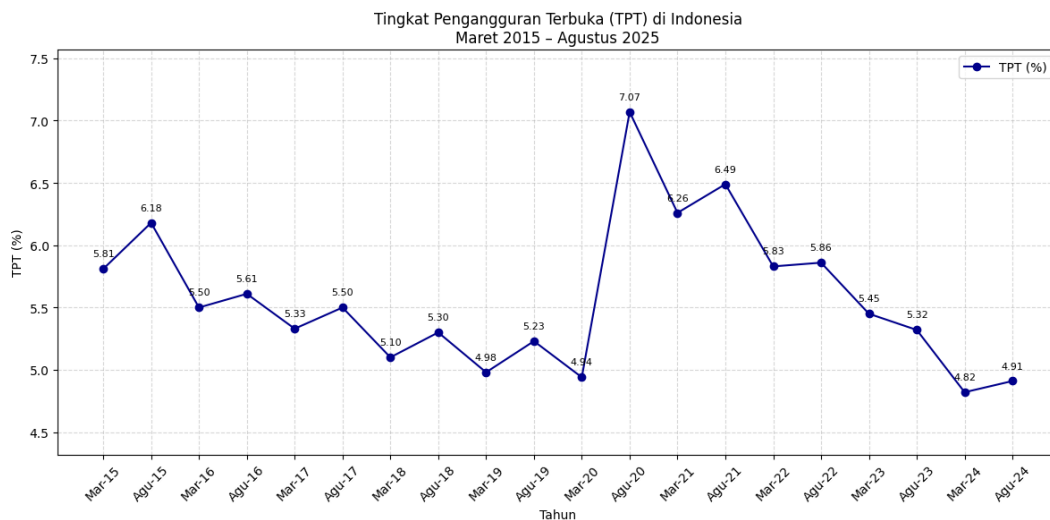
Selanjutnya, pada Maret 2024, Gini Ratio menurun menjadi 0,379, namun kembali meningkat ke angka 0,381 pada September 2024. fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan penurunan dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada dalam kategori sedang dan cenderung stabil selama sepuluh tahun terakhir. Artinya Indonesia memiliki potensi untuk masuk ke kategori ketimpangan tinggi apabila tidak disertai dengan upaya konkret dalam mengendalikan ketimpangan pendapatan. Ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand (sekitar 0,351)¹⁰ dan Vietnam (sekitar 0,361),¹¹ tingkat ketimpangan Indonesia tergolong lebih tinggi.

Salah satu penyebab utama ketimpangan adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran mengakibatkan rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Pengangguran juga menjadi indikator penting dalam menilai seberapa baik kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga, semakin banyak pengangguran, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, karena orang-orang yang seharusnya

¹⁰Statista, The Gini Coefficient, (Thailand: Socioeconomic Indicators, 2024, <https://www.statista.com/outlook/co/socioeconomic-indicators/thailand>

¹¹Statistita, The Gini Coefficient, (Vietnam: Socioeconomic Indicators, 2024), <https://www.statista.com/study/174058/socioeconomic-indicators-vietnam-report/>

bisa bekerja dan dapat penghasilan justru tidak punya pekerjaan. Akibatnya, ketimpangan pendapatan pun jadi semakin tinggi¹²



Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2015-2024

Berdasarkan gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama periode Maret 2015 hingga Agustus 2024,¹³ terlihat adanya fluktuasi nilai yang mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan nasional. Pada awal tahun, yakni Maret 2015, TPT tercatat sebesar 5,81 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015. beberapa tahun berikutnya, TPT mengalami kecenderungan menurun secara bertahap, dari 5,50 persen pada Maret 2016 menjadi 4,94 persen pada Maret 2020.

Namun, Kondisi tersebut berubah secara signifikan pada Agustus 2020, di mana TPT melonjak tajam menjadi 7,07 persen. Seiring berjalannya waktu,

¹² Maria G. Egeten, George M.V Kawung, and Krest D.Tolosang, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 3 (2023): 25–36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/46512>.

¹³ BPS Indonesia “Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)”, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.

memasuki tahun 2021 dan seterusnya, TPT menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada Maret 2021, TPT tercatat sebesar 6,26 persen dan terus menurun hingga mencapai 5,83 persen pada Maret 2022.

Penurunan ini berlanjut pada periode berikutnya dengan nilai 5,45 persen pada Maret 2023 dan mencapai angka terendah pada Maret 2024, yaitu sebesar 4,82 persen. Adapun pada Agustus 2024, TPT mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,91 persen. Kenaikan ini bersifat wajar dan kemungkinan besar disebabkan oleh faktor musiman. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah bertambahnya jumlah pencari kerja baru, seperti lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, yang memasuki pasar tenaga kerja pada pertengahan tahun. Meskipun mengalami kenaikan, nilai tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Agustus 2020.

Jika dilihat dari perprovinsi, semuanya terkena dampak. Contohnya, Jakarta dan Kepulauan Riau sempat mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi saat pandemi. Bahkan Bali, yang sebelumnya punya pengangguran paling rendah, ikut naik tajam karena sektor pariwisata lumpuh. Namun sekarang sudah mulai menurun, dari 5,63% turun ke 1,87% di 2024. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di tingkat daerah telah berjalan secara bertahap dan memberi dampak nyata terhadap ketersediaan lapangan kerja.

Salah satu penyebab ketimpangan pendapatan atau perbedaan besar antara yang kaya dan miskin adalah pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan yang

rendah cenderung punya peluang kerja yang lebih kecil dan gaji yang lebih rendah.¹⁴

Tabel 1.1 AMH, RLS, dan HLS tahun 2015-2024

Tahun	Komponen		
	Angka Melek Huruf (AMH)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
2015	99,67	7,84	12,55
2016	99,67	7,95	12,72
2017	99,66	8,1	12,85
2018	99,71	8,17	12,91
2019	99,76	8,34	12,95
2020	99,78	8,48	12,98
2021	99,78	8,54	13,08
2022	99,8	8,69	13,1
2023	99,83	8,77	13,15
2024	99,83	8,85	13,21

Berdasarkan tabel 1.1 Pendidikan pada IPM memperlihatkan tiga indikator yaitu angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, dan harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. Angka Melek Huruf menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu di atas 99 persen. Rata-rata Lama Sekolah meningkat sebesar 1,01 tahun. sementara Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebesar 0,66 tahun, Selama periode 2015-2024.

Pada tahun 2015, AMH tercatat sebesar 99,67%, dan angka ini bertahan stabil hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, AMH mengalami sedikit penurunan menjadi 99,66%, namun kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 99,71%. Selanjutnya, AMH terus menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 99,83%

¹⁴ Audie O. Niode Ari Pieter Runturambi, Tri Oldy Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Manado," *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 2 (20AD): 97–108.

pada tahun 2023 dan 2024. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia telah memiliki kemampuan membaca dan menulis, yang merupakan indikasi positif terhadap kualitas pendidikan dan keterampilan dasar masyarakat.

HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,58 persen per tahun. Peningkatan HLS ini merupakan sinyal positif yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2024, HLS di Indonesia mencapai 13,21 tahun, yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Diploma 1 (D1).

RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh sebesar 1,43 persen per tahun selama periode 2015-2024. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pada tahun 2024, secara rata-rata, pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas telah mencapai 8,85 tahun, yang menunjukkan bahwa individu-individu dalam kelompok usia tersebut hampir menyelesaikan pendidikan hingga tingkat kelas IX (Sekolah Menengah Pertama/SMP).¹⁵

Adanya salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah wajib belajar 12 tahun pada warga negaranya. Meskipun telah dikeluarkannya Permendikbud No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dalam upaya mendorong adanya program wajib belajar 12 tahun pada kenyataannya belum hadirnya blueprint (cetak biru) wajib

¹⁵ BPS Indonesia “ (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)”, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

belajar 12 tahun yang dibuat secara presisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.¹⁶

Dika Romadona dalam penelitiannya menyatakan pengangguran berpengaruh besar terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, semakin banyak orang yang nganggur, maka semakin besar juga jarak antara yang kaya dan yang miskin.¹⁷ Tetapi beda halnya dengan pendapat Nesha, yang justru menyatakan pengangguran tidak terlalu ngaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Jadi, ada perbedaan hasil di antara dua penelitian tersebut.¹⁸ Kemudian penelitian dari Darmuji yang menyatakan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan.¹⁹ Tapi penelitian yang sekarang ini berbeda, karena peneliti menambahkan satu hal baru, yaitu variabel moderasi (pendidikan).

Dengan demikian beberapa penelitian sebelumnya, hasilnya masih belum konsisten atau belum sepakat. Jadi penelitian ini mencoba mengkaji lagi apakah benar ketimpangan pendapatan ada hubungannya langsung dengan tingkat pengangguran. Yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti sekarang ini ingin melihat apakah tingkat pendidikan bisa mempengaruhi

¹⁶ Affriliani, Friscilla Wulan Tersta, and Linardo Pratama, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2025): 418–25.

¹⁷ Dika Romadona et al., "Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 3, no. 1 (2024): 169–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.2774>.

¹⁸ Nesha Rizky Ashari et al., "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia."

¹⁹ Darmuji, Alawiyah, and Hasanah, *Dampak Kualitas Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi: Sebuah Analisis. Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (2024): 458–467, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i8.3183>.

atau memperkuat hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pengangguran atau bisa jadi pendidikan memperlemah atau justru memperkuat pengaruhnya.

Menjadikan pendidikan sebagai variabel moderasi ini adalah hal baru, karena sejauh yang dilakukan oleh peneliti masih terbatas untuk variabel moderasi yang membahas peran pendidikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan jika dimoderasi oleh tingkat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan jika dimoderasi oleh tingkat pendidikan.

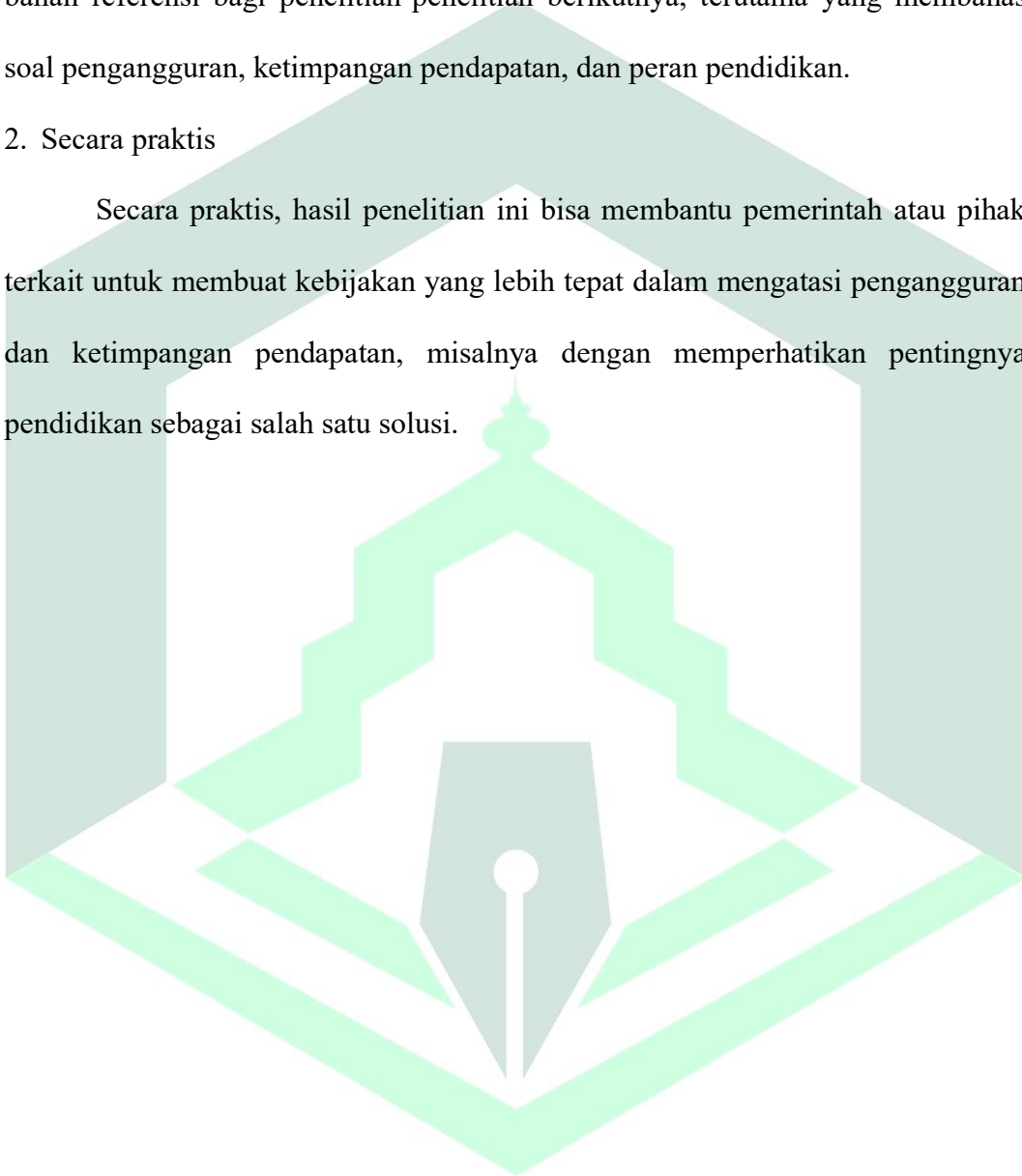
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan jadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang membahas soal pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan peran pendidikan.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa membantu pemerintah atau pihak terkait untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi pengangguran dan ketimpangan pendapatan, misalnya dengan memperhatikan pentingnya pendidikan sebagai salah satu solusi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Anggia Sekar Putri & Seftia Anggraini (2024), berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Tanjungpinang”.²⁰

Penelitian ini membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran memengaruhi ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungpinang. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa saat ekonomi tumbuh dan upah minimum naik, kesenjangan pendapatan bisa menurun, namun jika pengangguran tinggi, akan membuat kesenjangan makin besar. Artinya, pemerintah perlu mendorong terciptanya lapangan kerja dan memberi upah yang layak supaya hasil pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih merata oleh semua kalangan.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif, jenis data, serta keduanya melibatkan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan adapun perbedaanya yaitu terletak pada variabel moderasi. Populasi dan sampel.

²⁰ Anggia Sekar Putri and Seftia Anggraini, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang,” *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang* 7, no. 2 (December 23, 2024): 100–109, <https://doi.org/10.52624/manajerial.v7i2.2438>.

2. Nesha Rizky Ashari *et al.* (2024), berjudul “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”.²¹

Penelitian ini menemukan bahwa semakin baik pendidikan seseorang, makin kecil kemungkinan adanya kesenjangan pendapatan. Sebaliknya, makin banyak orang miskin, makin besar pula ketimpangan pendapatannya. Uniknya, tingkat pengangguran ternyata tidak terlalu berpengaruh besar terhadap ketimpangan, yang berarti penyelesaian masalah ketimpangan tidak cukup hanya lewat penyediaan pekerjaan saja.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta ketiganya melibatkan pendidikan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan adapun perbedaanya yaitu terletak pada variabel moderasi, analisis data panel, populasi dan sampel.

3. Istikharoh, Whinarko Juli Prijanto, & Rian Destiningsih (2020), berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018”.²²

Hasilnya cukup mengejutkan, karena ternyata makin tinggi pendidikan dan upah minimum justru bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sementara tingkat pengangguran tidak terlalu berpengaruh. Secara keseluruhan, ketiga faktor

²¹ Nesha Rizky Ashari *et al.*, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.”

²² Istikharoh, Whinarko Juli Prijanto, and Rian Destiningsih, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018,” *Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2018): 109–25, <https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i1.1399>.

ini tetap punya pengaruh jika dilihat bersama-sama, yang menunjukkan bahwa masalah ketimpangan itu kompleks dan saling terkait.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif, data sekunder serta keduanya melibatkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan adapun perbedaanya yaitu terletak pada variabel moderasi, analisis data panel, populasi dan sampel.

4. Muhammad Ersad, Amri Amir, & Zulgani (2022), “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan”.²³

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan (2010-2019) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, hanya tingkat pengangguran yang berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial; IPM dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan secara individual. Ini menunjukkan bahwa meskipun IPM dan kemiskinan berkontribusi pada ketimpangan secara keseluruhan, mengurangi pengangguran adalah strategi utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif, data sekunder, analisis data, serta keduanya melibatkan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan adapun perbedaanya yaitu terletak pada variabel moderasi, populasi dan sampel.

²³ Muhamnad Ersad Ersad, Amri Amir, and Zulgani Zulgani, “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 2 (September 30, 2022): 425–38, <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>.

5. Sherly Senja Rindiani, Fadhlurrahman Ruslan, & Syofriza Sofyan (2025), “berjudul Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia”.²⁴

penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan (diukur dengan rasio Gini) baik jangka pendek maupun panjang. Pertumbuhan ekonomi hanya berpengaruh negatif jangka pendek, sementara IPM dan pendapatan per kapita justru meningkatkan ketimpangan dalam jangka panjang dan pendek. Oleh karena itu, peningkatan belanja publik pada sektor-sektor sosial terbukti efektif menurunkan ketimpangan, namun perlu diimbangi kebijakan yang memastikan manfaat IPM dan peningkatan pendapatan merata di semua lapisan masyarakat.

Persamaan pada penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif, data sekunder serta keduanya melibatkan pendidikan dan ketimpangan pendapatan adapun perbedaanya yaitu terletak pada variabel moderasi, analisis data, populasi dan sampel.

B. Kajian Teori

1. Teori yang digunakan

a. Teori Simon Kuznets

Simon Kuznets adalah seorang ahli ekonomi kelahiran ukraina 1901, Kuznets mengemukakan teorinya pada tahun 1955, yang hubungan-nya antara

²⁴ Sherly Senja Rindiani, Fadhlurrahman Ruslan, and Syofriza Sofyan, “Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 5, no. 1 (2024): 33–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/v5i1.21552>.

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Saat sebuah negara mulai berkembang dari negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di pertanian menjadi negara industri, ketimpangan pendapatan biasanya naik duluan. Hal ini terjadi karena sebagian kecil orang yang duluan masuk ke sektor industri mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang masih di sektor pertanian.²⁵

Namun seiring waktu, saat semakin banyak orang beralih ke pekerjaan di sektor industri dan jasa, ketimpangan itu mulai menurun. Ketika manfaat dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, kesenjangan pendapatan jadi berkurang. Bentuk hubungan ini sering digambarkan seperti kurva huruf U terbalik, yang dikenal dengan istilah "kurva Kuznets".²⁶

Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita melalui kurva U terbalik, yang dikenal sebagai kurva Kuznets.²⁷ Kurva ini menggambarkan hipotesis bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan cenderung meningkat. Namun, seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, ketidaksetaraan pendapatan akan mencapai titik puncak, lalu mulai menurun. Bentuk U terbalik ini menunjukkan hubungan yang tidak linier antara kedua variable tersebut.

²⁵ Manto, *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2024* (Depok: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2024), 6

²⁶ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, Kedua (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018), 81

²⁷ Muhammad Farhan and Sugianto Sugianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 4 (2022): 243–58, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>.

Teori Simon Kuznets adalah pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya”. Teori menekankan peningkatan kapasitas produksi jangka panjang suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya, bukan hanya peningkatan output sesaat. Sehingga melihat pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan lebih dari sekadar peningkatan angka-angka ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara suatu negara dapat meningkatkan output perekonomian disertai dengan penyesuaian ideologi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang/jasa di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat pula peningkatan outputnya.²⁸

2. Ketimpangan Pendapatan

a. Teori dan Konsep Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu dalam masyarakat.²⁹ Todaro dan Smith dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan adalah ketidakseimbangan dalam distribusi total pendapatan nasional di antara banyak rumah tangga.³⁰ Selain itu, menurut Kuncoro, ketimpangan pendapatan

²⁸ Adelia Suryani, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 48–56, <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i1.661>.

²⁹ Nurhayati, *Buku Referensi Ekonomi Pembangunan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 62

³⁰ Devi Yuliana Putri and Renca Shinta Aminda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Of Development Economic and Digitalization* 3, no. 1 (2024): 87–108, <https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/7667>.

merupakan standar hidup relatif bagi seluruh masyarakat, yang disebabkan oleh jarak antardaerah, yakni perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.³¹ Berikutnya, menurut Baldwin, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan miskin, hal ini tercermin dalam perbedaan pendapatan yang diperoleh³² Dari beberapa definisi tersebut sehingga dapat dipahami bahwa ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana terjadi perbedaan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Artinya, sebagian orang mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini bisa berdampak negatif, seperti menimbulkan ketidakadilan sosial, meningkatkan kemiskinan, dan memicu konflik.³³ Faktor-faktor seperti jarak antar wilayah dan perbedaan sumber daya dan faktor produksi memainkan peran penting dalam menciptakan kesenjangan ini. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga mencerminkan perbedaan kesejahteraan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, yang terlihat jelas dari perubahan pendapatan yang diterima.³⁴

³¹ Elverbinta Br Gurusinga, Daisy S.M. Engka, and Krest D Tolosang, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 7 (2022): 37–48, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/44779>.

³² Reika Happy Sugiastuti and Muhammad Rizki Pratama, "Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis* 16, no. 1 (2022): 79–90, <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2022.-16.01.8>.

³³ Fasiha and Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan" 9, no. 01 (2023): 14, <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3002>.

³⁴ Haidar Akhmad Al Barabasi and Hastarini Dwi Atmanti, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017-2023 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 3, no. 1 (January 7, 2025): 221–34, <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1097>.

Menurut Dumairy (1996: 56) distribusi pendapatan berkaitan dengan pemerataan pendapatan. dapat dilihat dari segi:

- 1) Distribusi pendapatan antar tingkat pendapatan masyarakat
- 2) Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar provinsi dan antar daerah (barat, tengah, timur)
- 3) Distribusi pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

Menurut Adelman dan Morris, ada delapan faktor utama yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang. Faktor pertama adalah perbedaan tingkat pendidikan, yang berarti orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan yang kurang berpendidikan. Faktor kedua adalah perbedaan akses terhadap teknologi, yang memengaruhi produktivitas dan pendapatan seseorang.³⁵

Faktor ketiga adalah perbedaan kesempatan kerja, terutama dalam sektor formal dan informal. Banyak orang yang hanya bisa bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, sementara sebagian kecil yang bekerja di sektor formal mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Faktor keempat adalah perbedaan akses terhadap modal atau sumber daya ekonomi, yang memungkinkan sebagian orang bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.

Selanjutnya, faktor kelima adalah perbedaan geografis, misalnya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Biasanya, pendapatan di kota lebih tinggi karena lebih banyak peluang kerja dan fasilitas yang mendukung dibandingkan di desa.

³⁵ Zaiyang Li, Hassan Swedy Lunku, and Shaohua Yang, "Financial Inclusion in the Digital Era: A Key Driver for Reducing Income Inequality," *Technological and Economic Development of Economy* 31, no. 3 (2025): 706–31, <https://doi.org/10.3846/tede.2025.23068>.

Faktor keenam adalah struktur keluarga dan budaya, di mana norma dan kebiasaan tertentu dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, misalnya peran gender dalam pekerjaan.³⁶

Faktor ketujuh adalah kebijakan pemerintah yang tidak merata, seperti kebijakan fiskal atau distribusi subsidi yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Faktor terakhir adalah perkembangan ekonomi secara keseluruhan, di mana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Semua faktor ini saling berkaitan dan membuat ketimpangan pendapatan menjadi masalah kompleks di banyak negara berkembang.³⁷

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kebijakan yang tepat agar peluang ekonomi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari peningkatan pendidikan, pemerataan akses teknologi, hingga reformasi kebijakan yang lebih adil. Dengan begitu, ketimpangan pendapatan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara merata.

Todaro menjelaskan bahwa terdapat indikator ketimpangan pendapatan yaitu:³⁸

a) Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah alat ukur statistik yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Nilainya

³⁶ Patrick Bennett et al., "Education and Inequality: An International Perspective," *Fiscal Studies* 45, no. 3 (2024): 429–54, <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12394>.

³⁷ Mahasiswa Sosiologi, *Ketimpangan Dalam Pembangunan Bunga Rampai Realitas Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2017).

³⁸ Humaida Muafiqie, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Pendekatan Makro Dan Mikro)* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023), 122

berkisar antara 0 sampai 1, di mana angka 0 menunjukkan bahwa pendapatan dibagi secara sempurna dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Sebaliknya, nilai 1 menggambarkan ketimpangan yang ekstrem, sehingga seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu individu atau kelompok kecil saja. Koefisien ini sangat penting untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai seberapa besar ketidakmerataan pendapatan yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah.

Untuk menghitung Koefisien Gini, digunakan data yang digambarkan dalam Kurva Lorenz. Semakin jauh kurva ini menyimpang dari garis diagonal yang menunjukkan distribusi pendapatan sempurna, semakin besar pula nilai Koefisien Gini-nya. Koefisien Gini sering dijadikan sebagai indikator utama oleh para ekonom dan pembuat kebijakan untuk mengukur dan membandingkan ketimpangan ekonomi antar negara atau daerah, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain memberikan angka yang jelas tentang ketimpangan, Koefisien Gini juga memungkinkan analisis tren ketimpangan dari waktu ke waktu. Dengan memantau perubahan nilai Gini, pemerintah dan lembaga terkait dapat menilai efektivitas program redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif atau bantuan sosial. Dengan demikian, Koefisien Gini bukan hanya alat ukur statistik, tetapi

juga instrumen penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.³⁹

Menurut Todaro, disparitas pendapatan dihitung dengan menggunakan koefisien rasio Gini, yang secara matematis dirumuskan sebagai:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (FC_i + FC_{i-1})$$

Keterangan:

GR = Gini Ratio / Indeks Gini

F_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1).

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) dan 1 (sangat timpang), jika:

G < 0.3 = Ketimpangan Rendah

(0.3 ≤ G ≤ 0.5) = Ketimpangan sedang

G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi⁴⁰

b) Kurva Lorenz

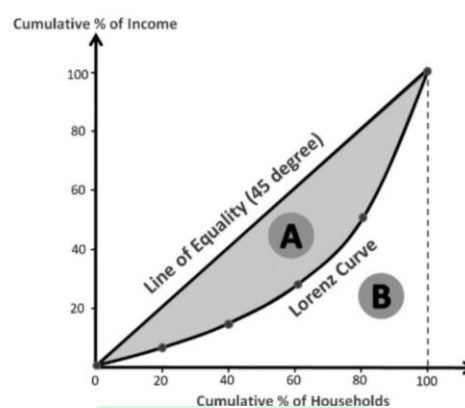
Kurva Lorenz adalah representasi grafis yang menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan dalam sebuah masyarakat. Pada grafik ini, sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk yang diurutkan dari yang

³⁹ Afdal Chatra, Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0) (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 55

⁴⁰ Yogi, Pradono, and Aritenang, Pengantar Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Praktis (Bandung: ITB, 2018), 21.

termiskin hingga terkaya, sementara sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut. Jika distribusi pendapatan sangat merata, maka Kurva Lorenz akan membentuk garis diagonal lurus dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas, yang disebut garis kesetaraan sempurna.⁴¹

Namun, dalam kenyataannya, distribusi pendapatan biasanya tidak merata, sehingga kurva ini akan melengkung ke bawah dari garis diagonal tersebut. Semakin besar kelengkungan kurva Lorenz, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi, karena artinya sebagian besar pendapatan dikuasai oleh kelompok kecil penduduk yang berada di ujung atas. Kurva Lorenz ini menjadi alat visual yang sangat berguna untuk memahami bagaimana pendapatan didistribusikan dan untuk membandingkan tingkat ketimpangan antar populasi yang berbeda.⁴²



Gambar 2.1 Kurva Lorentz

⁴¹ Tri Widayati, *Perekonomian Indonesia (Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 46

⁴² Maria Anita Titu, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2023), 67

Selain itu, Kurva Lorenz juga menjadi dasar dalam perhitungan Koefisien Gini. Jarak antara garis kesetaraan sempurna dan Kurva Lorenz diukur dan diubah menjadi nilai numerik yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Oleh karena itu, Kurva Lorenz tidak hanya membantu dalam memahami ketimpangan pendapatan secara visual, tetapi juga memberikan landasan matematis bagi pengukuran ketimpangan yang lebih formal menggunakan Koefisien Gini.⁴³

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sjafrizal ketimpangan pendapatan diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: sumber daya alam yang berbeda, faktor demografis (ketenagakerjaan dalam hal ini pengangguran), mobilitas barang dan jasa yang kurang lancar, konsentrasi kegiatan ekonomi dan pengalokasian dana pembangunan.⁴⁴

1. Perbedaan sumber daya alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan

⁴³ Aris Soelistyo, *Macroecomometric Model: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macropprudential Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

⁴⁴ Sjafrizal S, *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah.⁴⁵ Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barangbarang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

2. Perbedaan kondisi demografis

Selain itu, adanya perbedaan yang signifikan dalam kondisi demografis antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kondisi demografis yang dimaksud termasuk perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, kondisi demografis yang buruk pada suatu wilayah akan menyebabkan produktivitas kerja yang lebih rendah, yang menghambat penanaman modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴⁶

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat meningkat sebagai akibat dari mobilitas barang dan jasa yang tidak lancar. Mobilitas barang dan jasa ini mencakup kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi yang disponsori pemerintah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika mobilitas barang dan jasa lancar, produksi yang berlebihan dari suatu wilayah tidak dapat dijual ke wilayah lain yang membutuhkannya. Demikian pula, migrasi yang tidak lancar

⁴⁵ Vera Paulin Kay, "Kesenjangan Pendapatan Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Periode 2005-2010," *Jurnal Administrasi Terapan* 1, no. 1 (2020): 75.

⁴⁶ Puti Andiny, Nursani Adelida, and Rahma Meutia, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa)," *Jurnal Samudera Ekonomika* 3, no. 1 (2021): 47–56.

menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat digunakan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi karena kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat digunakan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya, sehingga sulit bagi daerah terbelakang untuk mendorong proses pembangunan.

4. Kosentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Sangat jelas bahwa ketimpangan pembangunan di antara wilayah akan dipengaruhi oleh kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi di daerah tertentu. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa daerah tertentu memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Yang kedua adalah bahwa daerah tersebut memiliki lebih banyak pilihan transportasi, baik darat, laut, atau udara, dan yang ketiga adalah kondisi demografis, atau populasi, yang juga mempengaruhi karena kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik.

5. Pengalokasian dan pembangunan

Bagaimana investasi pemerintah didistribusikan ke daerah lebih banyak ditentukan oleh bagaimana sistem pemerintahan daerah berfungsi. Jika sistem pemerintahan daerah bersifat sentralistik, dana pemerintah cenderung lebih banyak diberikan kepada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan daerah bersifat otonomi atau federal, dana pemerintah cenderung lebih banyak diberikan

kepada daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan lebih rendah. Alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik adalah beberapa sektor yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu cara lain alokasi dana pemerintah akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah.⁴⁷

Menurut Arsyad ketimpangan pendapatan disebabkan dari faktor pembangunan daerah yang berbeda, potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, letak geografis wilayah dan etnis.⁴⁸ Faktor-faktor lain yang menyebabkan ketimpangan pendapatan diantaranya: kurangnya homogenitas angkatan kerja karena perbedaan pendidikan dan bakat antar individu dalam masyarakat, distribusi sumber daya yang tidak merata, perbedaan pembangunan antar wilayah, perubahan teknologi, inflasi, globalisasi, kondisi lapangan kerja dan pengangguran.⁴⁹

3. Tingkat Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang dalam angkatan kerja ingin mencari pekerjaan. tetapi belum dapat memperolehnya.⁵⁰ Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak dianggap sebagai

⁴⁷Puti Andiny, Nursani Adelida, and Rahma Meutia, 52

⁴⁸ Frederic Winston Nalle et al, ““Regional Development Disparity and Mapping of Economic Potential in East Nusa Tenggara Province,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 673.

⁴⁹ Chatra et al, *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, 71.

⁵⁰ Lasiyama Mayasurru et al., *Ekonomi Dan Bisnis Islam Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 61

pengangguran.⁵¹ menurut Sukirno pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.⁵² Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.⁵³ Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.⁵⁴

Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang aktif mencari pekerjaan.⁵⁵ Artinya, orang tersebut ingin dan siap bekerja, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dalam periode tertentu. Pengangguran menjadi salah satu masalah ekonomi yang penting karena menunjukkan

⁵¹ Agus Sulistiyono et al., *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. (Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati: Insania, 2021), 51.

⁵² Kasypul Anwar, "Analysis of the Effect of Education and the Gini Ratio on the Unemployment Rate in South Kalimantan," *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (July 4, 2023): 9–18, <https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.1993>.

⁵³ Trista Senja et al., "Analisis Pengaruh Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo Tahun" 4, no. 1 (2024): 203–9, <https://journal-nusantara.id/index.php/EKOMA/article/view/5211>.

⁵⁴ Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Booklet Sakernas* (Badan Pusat Statistik, 2021).

⁵⁵ Reniwati Lubis et al., "Peran Dan Strategi UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 4082–94, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4611>.

ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada di pasar tenaga kerja.⁵⁶

Pengangguran dapat terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah faktor struktural. Faktor struktural muncul ketika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari sektor pertanian ke industri atau teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Ketika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baru, maka pengangguran struktural akan muncul. Contohnya, pekerja di sektor lama yang tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan sektor baru akan sulit mendapatkan pekerjaan.⁵⁷

Pengangguran juga dapat dibedakan berdasarkan durasi dan jenisnya. Terdapat pengangguran jangka pendek yang biasanya dialami oleh lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan pertama, dan pengangguran jangka panjang yang dialami oleh mereka yang sudah lama tidak bekerja. Jenis pengangguran lainnya adalah pengangguran terbuka, di mana seseorang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, dan pengangguran terselubung, yaitu kondisi di mana seseorang sebenarnya bekerja tetapi dengan jam kerja yang sangat sedikit atau upah yang sangat rendah sehingga dianggap tidak produktif secara ekonomi.⁵⁸

Dampak pengangguran sangat luas dan berpengaruh pada individu maupun masyarakat. Secara individu, pengangguran dapat menyebabkan

⁵⁶ Husnud Diniyah and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Factors Affecting Unemployment Rates In Indonesia," *Journal Of Economics* 2, no. 2 (2024): 155–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50992>.

⁵⁷ Cut Nova Rianda, "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>.

⁵⁸ Gunawan Aji et al., 'Pengaruh Indeks Harga Transport, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Persentase Pengangguran Di Kabupaten Pekalongan', *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2.2 (2023), 13 <<https://doi.org/10.8734/musyrtari.v2i4.1049>>.

penurunan pendapatan, hilangnya keterampilan, dan tekanan psikologis seperti stres dan depresi. Secara sosial, pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kriminalitas. Oleh karena itu, pengurangan pengangguran menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara.⁵⁹

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah biasanya melakukan berbagai kebijakan dan program. Misalnya, memperluas lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, serta memberikan insentif kepada perusahaan untuk membuka lapangan kerja baru.⁶⁰ Selain itu, program kewirausahaan juga didorong agar masyarakat dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja formal.⁶¹

b. Pengangguran Dalam Islam

Pengangguran dalam Islam dipandang sebagai salah satu masalah sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Islam mengajarkan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, kerja keras dan mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setiap individu agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan

⁵⁹ Silva Nur'aini et al., 'Transformasi Era Digital: Peluang Menggali Pekerjaan Dan Tanggung Terhadap Meningkatkan Pengangguran', <https://Jurnal.Dokicti.Org/Index.Php/ECONIS/Article/View/149/128>, 1.2 (2023), 63–73.

⁶⁰ Amini Isti Qomariah et al., "Mengidentifikasi Masalah Sosial Di Masyarakat Dan Mengetahui Teknik Mengatasinya Melalui Sebuah Kajian Literatur" 2, no. 3 (2024): 169–77, <https://mediacendekia.my.id/ojs/index.php/jppm/article/view/184>.

⁶¹ Khodijah Ishak, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia," 2019, 26, <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>.

berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengangguran dianggap sebagai keadaan yang tidak ideal dan harus diatasi.⁶²

Islam menekankan bahwa setiap orang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan dan rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, termasuk melalui pekerjaan dan usaha. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, tetapi juga ikut membangun dan menyejahterakan masyarakat. Sebaliknya, pengangguran yang berkepanjangan dapat menimbulkan kemalasan, ketergantungan, dan kerusakan moral.

Dalam perspektif Islam, pengangguran juga berkaitan dengan keadilan sosial. Islam mengajarkan pentingnya distribusi rezeki yang adil dan mencegah terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁶³ Pemerintah dalam Islam, melalui kepemimpinan yang adil, berkewajiban menyediakan lapangan kerja dan fasilitas yang memadai agar setiap warga negara dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.⁶⁴ Prinsip ini sejalan dengan konsep zakat, infaq, dan sedekah yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung.

Islam juga menolak sikap bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain atau negara tanpa usaha. Pengangguran yang terjadi akibat kemalasan atau sikap

⁶² Tetti Maisyaroh Lubis, "Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3562>.

⁶³ Agus Rojak Samsudin, Rizal Maulana, and Premi Anggraini, "Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia ; Telaah Dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah" 3, no. 2 (2024): 115–34, <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.62>.

⁶⁴ Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, and Apriza Apriza, "Pengangguran Dalam Perspektif Islam," *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (June 7, 2024): 90–100, <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.185>.

malas mencari kerja dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mendorong setiap individu agar memiliki inisiatif, kreatif, dan berusaha mandiri dalam mencari nafkah. Namun, bagi mereka yang memang tidak mampu bekerja karena alasan tertentu, Islam memberikan perhatian dan dukungan melalui mekanisme sosial yang tertata.⁶⁵

Di sisi lain, Islam juga mengatur hak-hak pekerja dan tata kelola ekonomi yang adil untuk mengurangi pengangguran. Islam menganjurkan sistem kerja yang adil, termasuk upah yang layak dan perlindungan terhadap pekerja. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, diharapkan tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif sehingga lapangan kerja dapat bertambah dan pengangguran dapat diminimalisir.⁶⁶

Pengangguran dalam Islam juga dilihat sebagai ujian dan kesempatan untuk memperkuat keimanan dan kesabaran. Dalam situasi sulit seperti tidak mendapatkan pekerjaan, seorang Muslim diajarkan untuk tetap bersabar, berdoa, dan berusaha dengan terus meningkatkan kemampuan diri. Islam mengajarkan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah SWT., namun manusia tetap harus berikhtiar dan tidak putus asa.

Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk membangun kewirausahaan dan kreativitas. Dengan kewirausahaan, masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran. Konsep ini sangat penting

⁶⁵ Harida, "Membangun Kemandirian Ekonomi Umat Melalui Kewirausahaan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2024): 565–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.183>.

⁶⁶ Nikmah Dalimunthe and Muhammad Al Amin Bintang, "Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan Uu Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal de Facto* 10, no. 2 (2024): 130–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.178>.

karena dapat memberdayakan individu dan kelompok agar mandiri secara ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal yang mungkin terbatas.⁶⁷

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak malas dan tidak berpangku tangan, melainkan harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS At-Taubah ayat 105).⁶⁸

Ayat ini menegaskan pentingnya usaha dan kerja nyata dalam kehidupan seorang muslim. Islam memandang kerja sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar untuk mencari penghasilan.

Rasulullah SAW juga mencontohkan hal ini melalui sabdanya dalam hadits riwayat Bukhari, bahwa seseorang yang mencari kayu bakar dan menjualnya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Pesan dari hadits ini sangat jelas bahwa Islam menghargai kerja keras, meskipun pekerjaan itu tampak sederhana atau kasar. Daripada

⁶⁷ Gugus Kriswahyudi, "Membangun Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Srikandi Journal of Islamic Economic and Banking 1, no. 1 (2022): 57–66, <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan (At-Taubah: 105)*, Kemenag RI.

menjadi beban orang lain, seorang muslim lebih baik berusaha sendiri dengan cara yang halal dan jujur.⁶⁹

Adapun Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran Menurut sukirno⁷⁰ yaitu:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat pengangguran ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi pasar tenaga kerja dan seberapa besar masalah pengangguran yang dihadapi. Jumlah yang menganggur dalam rumus ini mengacu pada orang-orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi aktif mencari pekerjaan selama periode tertentu. Sedangkan jumlah angkatan kerja mencakup seluruh penduduk usia kerja yang sedang bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan (termasuk yang menganggur). Dengan demikian, TPT memperlihatkan persentase tenaga kerja yang tidak bekerja tetapi siap dan ingin bekerja.⁷¹

Selain TPT, Sukirno juga mengidentifikasi beberapa indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, biasanya terjadi peningkatan produksi dan investasi, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga

⁶⁹ Azzuratul Nissa, Mohammad Orinaldi, and Faturahman, "Analisis Etos Kerja Islami Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pondok Pesantren Fathul Ulum Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 83–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.250>.

⁷⁰ Muhammad Ichksanul A Mokoagow and Andi Mardiana, "Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–8, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10650/pdf>.

⁷¹ Reki Ardian, Yulmardi Yulmardi, and Adi Bhakti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Aktual* 1, no. 1 (2021): 23–34, <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>.

kerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran naik. .⁷²

Kedua, struktur ekonomi juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Perubahan struktur ekonomi, misalnya dari sektor pertanian ke industri dan jasa, dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja baru. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pengangguran struktural, di mana pekerja lama sulit beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru yang tersedia. Ketiga, kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja sangat berperan penting. Kebijakan seperti pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan perlindungan sosial bagi penganggur dapat membantu menekan tingkat pengangguran. Sebaliknya, kebijakan yang tidak efektif atau pasar tenaga kerja yang rigid dapat memperburuk masalah pengangguran.⁷³

Dengan memahami indikator-indikator ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengurangi pengangguran. Misalnya, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengukuran TPT secara rutin

⁷² Juan Dwi Purnama, Subaheri Subaheri, and Deris Desmawan, "Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang," *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.53>.

⁷³ Adriyanto Adriyanto, Didi Prasetyo, and Rosmiyati Khodijah, "Angkatan Kerja Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 11, no. 2 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>.

juga membantu memantau perkembangan pasar tenaga kerja dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.⁷⁴

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi perkembangan pola berpikir seseorang karena semakin berpendidikan seseorang maka semakin banyak ilmu yang diperolehnya dan semakin mudah pula ia memahami sesuatu yang ada.⁷⁵ Menurut Hasbullah menyatakan bahwa pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai kebudayaan dan masyarakat.⁷⁶ Menurut Tirtarahardja et al., mendefinisikan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini.⁷⁷ Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu.⁷⁸ Menurut Sikula dalam Mangkunegara pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga

⁷⁴ Nani Hartati, "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2010-2016," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 01 (2020): 6, <https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946>.

⁷⁵ Diana Yulianti, "Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (August 9, 2021): 125–48, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.131>.

⁷⁶ Sri Asfirawati Halik Sri, "Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Jenepono," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (February 8, 2021): 46–57, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.39>.

⁷⁷ Milenia Raisa and Jovi Iristiawan, "Pengaruh Motivasi Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Departemen Perencanaan & Pengendalian PT PAL Indonesia (Perseo) Kota Surabaya," *Soetomo Management Review* 2, no. 5 (2024): 666–82, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smr/article/view/8210/3966>.

⁷⁸ Umar and Tri Haryanto, "Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Masalah Stunting Balita Di Indonesia," *Media Trend* 14, no. 1 (April 2, 2019): 41–48, <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4736>.

kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.⁷⁹

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi seorang karyawan karena dapat memberikan dampak baik bagi dirinya dan organisasi di tempat bekerja. pendidikan juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, karena dengan adanya pendidikan yang memadai maka pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai akan semakin luas dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengangguran di suatu negara atau wilayah. Pendidikan menentukan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam menghadapi dunia kerja. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.⁸⁰

Pendidikan memberikan modal intelektual yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat menguasai teknologi, keterampilan teknis, dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor industri dan jasa. Oleh

⁷⁹ Rahmat, Ahmad Firman, and Badaruddin, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penempatan, Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Takalar," *Nobel Management Review* 4, no. 2 (July 24, 2023): 305, <https://doi.org/10.37476/nmar.v4i2.4031>.

⁸⁰ Etik Setyorini Etik Setyorini and Hanifah Noviandari, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2022): 47–61, <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i1.295>.

karena itu, tenaga kerja berpendidikan tinggi cenderung memiliki pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan rendah.

Namun, tingginya pendidikan tidak selalu menjamin seseorang langsung mendapatkan pekerjaan. Ada fenomena yang dikenal dengan pengangguran terdidik, yaitu pengangguran yang dialami oleh lulusan pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kesempatan kerja yang tersedia, serta ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.⁸¹

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja ini disebut *mismatch* atau ketidakcocokan kompetensi. Misalnya, lulusan jurusan tertentu yang jumlahnya banyak tetapi peluang kerja di bidang tersebut sedikit, atau lulusan yang tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Situasi ini menyebabkan lulusan pendidikan tinggi tetap menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya.

pendidikan juga mempengaruhi mobilitas tenaga kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang baik cenderung lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja, termasuk berpindah pekerjaan atau lokasi kerja. Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan rendah biasanya memiliki mobilitas yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan baru ketika sektor tertentu mengalami penurunan.⁸²

⁸¹ Axellina Muara Setyanti and Firdaus Finuliyah, "Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.118>.

⁸² Elang Satrio Prakoso, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2010-2019," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7547>.

Selain itu, pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi membuat tenaga kerja lebih berharga bagi perusahaan dan industri, sehingga peluang untuk dipekerjakan juga lebih besar. Negara-negara dengan pendidikan penduduk yang tinggi umumnya memiliki pengangguran yang lebih rendah dan perekonomian yang lebih maju. Pemerintah sering kali berperan dalam mengatasi pengangguran dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi salah satu strategi penting agar lulusan pendidikan lebih siap kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan cara bagi setiap orang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaannya. Proses ini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui suatu bentuk pengajaran atau pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, tingkat dasar, sampai pendidikan tinggi. Baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Menurut teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pendidikan terdiri dari :

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator utama dalam menilai pendidikan suatu wilayah. Melek huruf mencerminkan kemampuan dasar

masyarakat dalam membaca dan menulis, yang menjadi fondasi dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan lainnya.⁸³

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah mengukur pendidikan masyarakat, dihitung berdasarkan jumlah tahun rata-rata pendidikan formal, yang telah dijaani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi RLS, maka semakin banyak tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat dalam suatu wilayah. RLS mencerminkan realisasi akses terhadap pendidikan yang telah dijalani.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

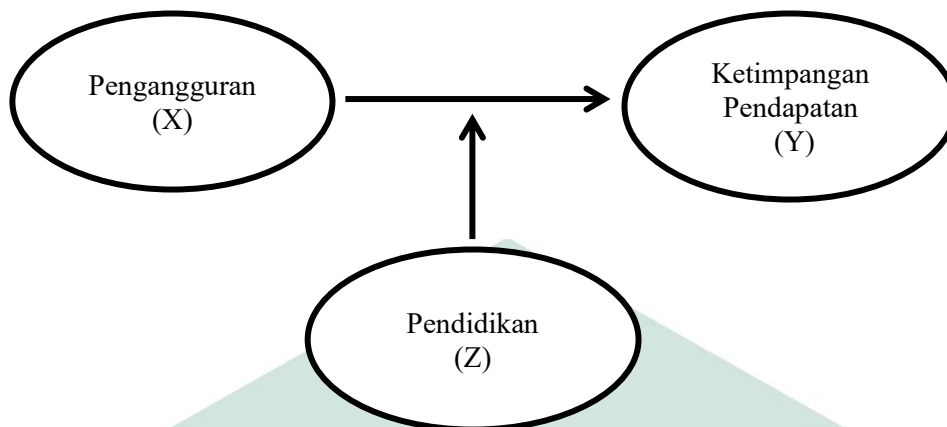
Harapan lama sekolah adalah mengindikasikan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak usia sekolah pada masa mendatang, apabila mengikuti sistem pendidikan yang berlaku. HLS memberikan gambaran tentang potensi masa depan dalam hal partisipasi pendidikan.⁸⁴

C. Kerangka Berfikir

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan pada hubungan antara pengangguran dengan ketimpangan pendapatan. Untuk memudahkan dalam menganalisis maka dibuatlah kerangka teoritis sebagai berikut:

⁸³ M. Shadri Isman Lubis, Dinie Triana, and Aulia Hani, "Faktor-Faktor Penentu Angka Melek Huruf Di Provinsi Gorontalo: Analisis Regresi Linear Berganda," *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam* 6, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.8734/trigo.v1i2.365>.

⁸⁴ Miftaqh Nur Faritz and Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 1 (2020): 15–21, <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>.



Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran. Ketimpangan pendapatan berperan sebagai variabel dependen. Sedangkan tingkat pendidikan merupakan variabel moderasi. Pengujian yang dilakukan nantinya akan mengukur apakah pengangguran berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di Indonesia dan apakah dengan adanya tingkat pendidikan akan memoderasi hubungan antara pengangguran dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis atau dugaan sementara yang ditarik oleh penulis adalah:

- a. H_0 : Pengangguran (X) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia.
- H_1 : Pengangguran (X) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia.

b. H_0 : Pengangguran (X) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia jika dimoderasi oleh tingkat pendidikan (Z).

H_2 : Pengangguran (X) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia jika dimoderasi oleh tingkat pendidikan (Z).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, artinya peneliti mengumpulkan data yang berupa angka-angka untuk dianalisis. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kausal, yang bertujuan untuk mencari tahu apakah ada hubungan sebab-akibat antara hal-hal yang diteliti.⁸⁵ Di sini, peneliti ingin melihat bagaimana pengangguran (yang disebut variabel bebas atau variabel X) mempengaruhi ketimpangan pendapatan (yang disebut variabel tergantung atau variabel Y). Selain itu, peneliti juga melihat peran tingkat pendidikan (variabel moderasi atau variabel Z) dalam hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jadi, tingkat pendidikan ini bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.

Untuk menganalisis hubungan-hubungan ini, peneliti memakai analisis jalur (*path analysis*). Metode ini membantu memetakan dan menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun melalui tingkat pendidikan.⁸⁶

B. Definisi Operasional Variabel

Pemaparan variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel dan indikator-indikator variabel dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁸⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2023),

66

⁸⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2023),

69

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Tingkat Pengangguran (X)	Persentase jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan dari total angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara. ⁸⁷	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ⁸⁸
2.	Pendidikan (Z)	Level atau jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh seseorang, yang menunjukkan seberapa tinggi pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. ⁸⁹	a. Angka Melek Huruf b. Rata-rata Lama Sekolah c. Harapan Lama Sekolah ⁹⁰
3.	Ketimpangan Pendapatan (Y)	ketimpangan Perbedaan atau kesenjangan dalam pembagian penghasilan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, di mana sebagian mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dibandingkan yang lain. ⁹¹	Gini Ratio ⁹²

⁸⁷ Reniwati Lubis et al., "Peran Dan Strategi UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Indonesia."

⁸⁸ Mokoagow and Mardiana, "Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo."

⁸⁹ Rizky Rinaldy Inkriwing, "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."

⁹⁰ Shadri Isman Lubis, Triana, and Hani, "Faktor-Faktor Penentu Angka Melek Huruf Di Provinsi Gorontalo: Analisis Regresi Linear Berganda."

⁹¹ Reika Happy Sugiastuti and Muhammad Rizki Pratama, "Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia."

⁹² Humaida Muafiqie, Pengantar Ilmu Ekonomi (Pendekatan Makro Dan Mikro) (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023), 122

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹³

Populasi dalam penelitian ini adalah pengangguran, ketimpangan, pendapatan, dan pendidikan sebanyak 340 data dikarena ada provinsi di Indonesia yang masi baru terbentuk sehingga data yang dibutuhkan oleh penelitian ini belum tersedia, maka peneliti tidak bisa menggunakan provinsi sebagai bagian dari populasi. Populasi yang peneliti gunakan merupakan 34 provinsi sebanyak 340 data.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁹⁴ Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling adalah adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sampel penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh anggota populasi atau sampel jenuh. Peneliti hanya menggunakan 34 provinsi sebanyak 340 data. Jumlah provinsi yang tidak lengkap dikarenakan adanya keterbatasan data dari beberapa provinsi dan ini tidak digunakan dalam penelitian tersebut. Maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan sampling jenuh.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 126

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 128

Terdapat 34 provinsi yang masuk dalam daftar di Indonesia yaitu:

Tabel 3. 2 Daftar 34 Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	Sumatera Selatan
7	Bengkulu
8	Lampung
9	KEP. Bangka Belitung
10	Kepulauan Riau
11	DKI Jakarta
12	Jawa Barat
13	Jawa Tengah
14	DI Yogyakarta
15	Jawa Timur
16	Banten
17	Bali
18	Nusa Tenggara Barat
19	Nusa tenna Timur
20	Kalimantan Barat
21	Kalimantan Tengah
22	Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur
24	Kalimantan Utara
25	Sulawesi Utara
26	Sulawesi Tengah
27	Sulawesi Selatan
28	Sulawesi Tenggara
29	Gorontalo
30	Sulawesi Barat
31	Maluku
32	Maluku Utara
33	Papua Barat
34	Papua

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dipakai adalah data sekunder, artinya data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga lain sebelumnya, bukan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data ini digunakan berupa data *time series* nasional Indonesia data yang diambil dalam jangka waktu tertentu, tahun 2015 sampai 2024.⁹⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengakses laporan tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan ini berisi informasi lengkap tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT), *Gini Ratio*, Angka Melek Aksara (AMA), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di setiap provinsi di Indonesia. Peneliti mengambil data tersebut langsung dari situs resmi BPS, lalu mengunduhnya agar bisa digunakan dalam penelitian. Setelah data diunduh, peneliti memeriksa data tersebut untuk memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan periode waktu yang dibutuhkan, yaitu dari tahun 2015 sampai 2024. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa data yang digunakan lengkap dan konsisten agar hasil penelitian nanti bisa dipercaya dan akurat.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dipakai untuk mengetahui apakah variabel bebas (pengangguran) benar-benar memengaruhi variabel terikat (ketimpangan pendapatan), dan apakah variabel moderasi (pendidikan) ikut

⁹⁵ Rismayanti, "Analisis Potensi Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi," *Gorontalo Development Review (GOLDER)* 4, no. 2 (2021): 77, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev/article/view/1736>.

mengubah pengaruh tersebut. Jadi, intinya peneliti ingin tahu hubungan sebab-akibat dan pengaruh tambahan dari variabel moderasi.

Untuk menganalisis data, peneliti memakai beberapa metode, antara lain:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif adalah cara untuk melihat gambaran umum data yang ada, seperti berapa rata-rata nilainya, seberapa jauh nilai-nilai tersebar, serta nilai tertinggi dan terendah dari data. Jadi, sebelum data diolah cari tahu terlebih dahulu seperti apa data yang dimiliki.⁹⁶

2. Analisis Regresi Data Panel

Metode ini digunakan untuk menguji apakah pengangguran dan pendidikan punya pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Data panel artinya data yang dikumpulkan dari beberapa provinsi selama beberapa tahun. Contohnya, peneliti menggunakan rumus regresi untuk melihat hubungan antara variabel-variabel itu.

3. Pemilihan Model Data Panel

Untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).⁹⁷

a. *Common Effect Model* (CEM): model yang paling sederhana, dengan cara menggabungkan semua data dari waktu dan wilayah tanpa membedakan.

⁹⁶ Feky Reken and Audia Junita, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 29

⁹⁷ Rahmad Solling Hamid et al., *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan EViewa 10* (Banten: CV. AA. Rizky, 2020), 76

b. *Fixed Effect Model* (FEM): model ini mempertimbangkan bahwa mungkin ada faktor tertentu yang tidak terlihat tapi berpengaruh, dengan cara menambahkan variabel dummy untuk mengatasi masalah tersebut.

c. *Random Effect Model* (REM): model ini menghitung kesalahan dengan lebih efisien dan menganggap variasi data berasal dari beberapa sumber secara acak. Model ini juga dianggap lebih baik kalau asumsi statistik tertentu terpenuhi.

Peneliti akan memilih model yang paling tepat setelah melakukan beberapa uji statistik, seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, agar hasil penelitian nanti benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk mengolah data, peneliti menggunakan software Eviews 12 karena software ini sangat cocok untuk menangani data panel dan bisa membantu memilih model analisis yang paling tepat.

4. Uji Statistik data Panel

Dalam analisis data panel, harus memilih model mana yang paling tepat agar hasil penelitian jadi akurat. Ada beberapa uji statistik yang biasa dipakai, yaitu:

a. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji ini dipakai untuk menentukan apakah kita harus pakai model *common effect* atau *fixed effect*. Jika hasil uji menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, berarti model *common effect* lebih cocok dipakai. Namun, jika p-value kurang dari 0,05, berarti model *fixed effect* yang lebih tepat. Setelah ini, kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau random effect. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka yang dipilih model *random effect*. Namun jika p-value kurang dari 0,05, berarti model *fixed effect* yang lebih cocok dipakai.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* atau *common effect* yang lebih pas. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka model common effect yang terpilih. Namun, jika p-value kurang dari 0,05, maka model *random effect* lebih sesuai.⁹⁸

G. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah sisa-sisa kesalahan (residual) dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Kenapa penting? Karena model yang baik biasanya punya residual yang normal, supaya hasil analisis valid.

1. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, artinya data residual berdistribusi normal.
2. Jika sebaliknya, nilai probabilitas kurang dari 0,05, artinya data residual tidak berdistribusi normal.

⁹⁸ Rahmad Solling Hamid et al., Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan EView 10 (Banten: CV. AA. Rizky, 2020), 67

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas (independen). Jika variabel-variabel ini saling terlalu berkaitan, maka modelnya bisa bermasalah karena sulit melihat pengaruh masing-masing variabel secara jelas.

- 1) Jika korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,80, artinya ada masalah multikolinearitas.
- 2) Jika korelasi kurang dari 0,80, artinya tidak ada masalah multikolinearitas dan variabel bebas bisa dipakai dengan baik.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk memeriksa apakah varians kesalahan (residual) pada setiap data sama atau tidak. Jika variansnya sama dari satu data ke data lain disebut homoskedastisitas (ini yang diinginkan). Jika terdapat perbedaan disebut heteroskedastisitas dan ini masalah. Uji yang dipakai adalah uji *Glejser*, yang cara kerjanya dengan menguji hubungan antara nilai *absolut residual* dengan variabel bebas.

- 1) Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas (*variance* sama).
- 2) Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, artinya terdapat masalah heteroskedastisitas (*variance* tidak sama).

4. Uji Autokorelasi

Uji ini untuk mengecek apakah ada hubungan antara kesalahan pada satu waktu dengan kesalahan di waktu sebelumnya. Jika ada hubungan ini, disebut

autokorelasi, dan bisa bikin hasil regresi jadi kurang akurat. Untuk mendeteksinya biasanya dipakai uji Durbin-Watson (DW test). Model yang baik itu bebas dari autokorelasi, artinya residualnya tidak saling terkait antar waktu.⁹⁹

H. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dipakai untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (independen) punya pengaruh langsung dan terpisah terhadap variabel terikat (dependen). Misalnya, ingin mengetahui apakah pengangguran saja mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

- a) Jika nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri.
- b) Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan secara sendiri-sendiri.

2. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Nilainya antara 0 sampai 1.

- a) Jika nilainya mendekati 0, berarti variabel bebas yang di pakai hampir tidak membantu menjelaskan perubahan variabel terikat.
- b) Jika nilainya mendekati 1, berarti variabel bebas yang di pakai hampir sepenuhnya bisa menjelaskan perubahan variabel terikat. Misalnya, jika R²-nya

⁹⁹ Wahyu Putri Ani Winata and Muhammad Wakhid Musthofa, "Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 9, no. 03 (2024): 17–19, <https://doi.org/10.29407/jae.v9i3.23494>.

0,8, itu artinya 80% perubahan ketimpangan pendapatan bisa dijelaskan oleh variabel pengangguran dan pendidikan dalam model.¹⁰⁰

3. Analisis Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis*)

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel utama dapat dipengaruhi oleh variabel ketiga, yang disebut variabel moderasi. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan, yang berperan dalam mempengaruhi pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan menggunakan analisis ini, tidak hanya menguji hubungan langsung antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga melihat apakah dan bagaimana tingkat pendidikan dapat mengubah atau memoderasi hubungan tersebut. Model regresi moderasi menambahkan variabel interaksi antara pengangguran dan tingkat pendidikan ke dalam analisis, sehingga memungkinkan pengujian apakah pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan menjadi lebih kuat, lebih lemah, atau tetap sama ketika tingkat pendidikan berubah. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien variabel interaksi ini signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan benar-benar berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰ Rahmad Solling Hamid et al., *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan EViewa 10* (Banten: CV. AA. Rizky, 2020), 76

¹⁰¹ A. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakad Media Publishing. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Indonesia terletak di antara 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan, dan antara 94° sampai 141° bujur timur. Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa (lintang 0°), yang artinya sebagian wilayahnya ada di belahan bumi utara dan sebagian lagi di belahan bumi selatan.

Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu Asia di utara dan Australia di selatan. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur.



Gambar 4.1
Peta Negara Indonesia

Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu Asia di sebelah utara dan Australia di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Posisi ini membuat Indonesia memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan internasional dan juga sebagai penghubung budaya serta ekosistem antara Asia dan Australia.

Indonesia memiliki batas wilayah yang jelas dengan negara-negara tetangga dan perairan di sekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat dan timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta negara Papua Nugini di timur. Batas-batas ini menunjukkan posisi Indonesia yang sangat luas dan strategis.

Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 1.910.931 km² dengan jumlah pulau lebih dari 17.500. Wilayah Indonesia terbentang mulai dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, dari Miangas di ujung utara hingga Pulau Rote di ujung selatan. Keanekaragaman wilayah ini juga terlihat dari pembagian zona waktu Indonesia yang terdiri dari WIB, WITA, dan WIT, yang menyesuaikan dengan perbedaan waktu di setiap bagian wilayahnya.

Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi yang tersebar di lima pulau besar dan satu kepulauan utama. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi, Pulau Kalimantan 5 provinsi, Pulau Jawa 6 provinsi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali 3 provinsi, Pulau Sulawesi 6 provinsi, serta Kepulauan Maluku dan Papua yang terdiri dari 8 provinsi. Pembagian wilayah ini mencerminkan keragaman budaya, sumber daya alam, dan kondisi geografis yang luas dan beragam di seluruh Indonesia.¹⁰²

¹⁰² Portal Informasi Indonesia, "Indonesia, accessed April 16, 2025, Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia.

B. Analisis Data

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Hasil uji model regresi data panel sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling tepat, antara model *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji Chow, yang ditunjukkan oleh nilai p-value, akan menentukan model mana yang lebih cocok. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, artinya model *common effect* yang lebih tepat. Namun jika p-value kurang dari 0,05, maka model *fixed effect* yang harus dipakai. Jadi, uji Chow membantu dalam menentukan cara terbaik untuk mengelolah data supaya hasilnya lebih akurat.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.851500	(33,304)	0.0000
Cross-section Chi-square	143.844222	33	0.0000

Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji Chow dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0000, yang artinya nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *common effect* untuk analisis data yang sedang dilakukan, karena hasil uji Chow menolak hipotesis bahwa model *common effect* lebih cocok, sehingga pemilihan model *fixed effect* dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan sesuai dengan data.

a. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat antara *fixed effect* atau *random effect* dalam analisis data panel. Jika hasil uji Hausman menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05, artinya model *fixed effect* lebih cocok digunakan. Namun jika p-value lebih besar 0,05, maka model *random effect* yang lebih sesuai digunakan. Karena, uji ini membantu untuk memilih cara analisis yang paling akurat sesuai dengan data yang dimiliki.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.895344	2	0.0043

Hasil uji Hausman pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0043, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya model *fixed effect* lebih cocok digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini karena dianggap memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan model *random effect*. Jadi, berdasarkan uji Hausman, peneliti pilih model *fixed effect*.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian tampak pada tabel 4.3:

Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif

	Y	C	X	Z
Mean	0.667800	1.000000	9.814500	121.1944
Median	0.683500	1.000000	9.045000	121.4250
Maximum	0.898000	1.000000	20.03000	125.5500
Minimum	0.245000	1.000000	2.280000	103.0500
Std. Dev.	0.132923	0.000000	3.281161	2.776411
Skewness	-1.247240	NA	0.643856	-3.741775

Kurtosis	4.415363	NA	2.968826	22.31715
Jarque-Bera	116.5305	NA	23.50496	6079.710
Probability	0.000000	NA	0.000008	0.000000
Sum	227.0520	340.0000	3336.930	41206.11
Sum Sq. Dev.	5.989626	0.000000	3649.680	2613.167
Observations	340	340	340	340

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diteliti sebanyak 340 sampel data yang berasal dari 34 provinsi dalam penelitian selama lima periode yaitu tahun 2015 hingga 2024.

Variabel Nilai provinsi diukur dengan Ketimpangan Pendapatan melalui Gini Rasio (Y) menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar 0,000000 yang diungkapkan dan nilai tertinggi sebesar 0,898000 yang diungkapkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap provinsi yang tercatat di BPS tahun 2015 hingga 2024 telah cukup dalam melakukan Nilai Provinsi karena nilai rata-rata Nilai provinsi yang dilakukan oleh 34 provinsi dalam penelitian sebesar 0,667800. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,132923.

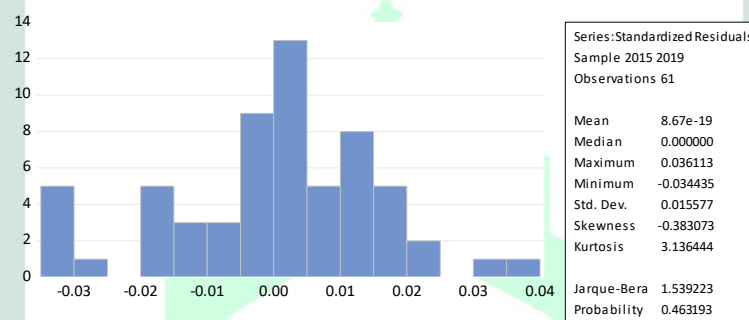
Variabel pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (X) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,000008 dan nilai tertinggi sebesar 20,03000. Nilai rata-rata sebesar 9,814500. Nilai standar deviasi sebesar 3,281161.

Variabel Pendidikan diukur dengan AMH, RLS, dan HLS (Z) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,000000 dan nilai tertinggi sebesar 125.5500. Nilai rata-rata sebesar 121,1944. Nilai standar deviasi sebesar 2.776411.

3. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang dimiliki berdistribusi secara normal atau tidak, artinya apakah data tersebut menyebar dengan pola yang umum atau tidak. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut normal dan dapat dipakai untuk analisis lebih lanjut. Namun, jika nilai kurang dari 0,05, artinya data tidak normal dan perlu perlakuan khusus sebelum dianalisis. Jadi, uji tersebut penting agar hasil analisis lebih valid dan dapat dipercaya.



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Jika nilai probabilitasnya 0,463193, artinya lebih besar dari 0,05, jadi data dianggap berdistribusi normal. Dengan kata lain, data tersebut sudah memenuhi syarat normalitas dan bisa dipakai untuk analisis lanjut tanpa perlu penyesuaian khusus.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas (independen) dalam model saling berkorelasi terlalu tinggi. Jika variabel-variabel ini saling berkorelasi kuat, bisa membuat hasil analisis jadi kurang valid

karena sulit mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara jelas. Jika nilai korelasi antar variabel independen lebih dari 0,80, berarti ada masalah multikolinearitas. Namun, jika nilainya di bawah 0,80, berarti tidak ada masalah multikolinieritas, dan variabel-variabel bisa dipakai dengan aman dalam model. Jadi, uji ini penting agar model regresi tetap akurat dan hasilnya dapat dipercaya.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X	Z
X	1.000000	0.268972
Z	0.268972	1.000000

Dari Tabel 4.4, nilai korelasi antara variabel X dan Z adalah 0,268972. Karena nilai ini masih di bawah 0,80, artinya tidak ada masalah multikolinearitas pada data tersebut. Jadi, variabel X dan Z tidak saling berkorelasi terlalu tinggi dan aman digunakan bersamaan dalam model regresi tanpa mengganggu keakuratan hasil analisis.

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians error (residual) pada model regresi sama di setiap pengamatan atau tidak. Jika variansnya sama, disebut homoskedastisitas, yang artinya model bagus. Namun, jika variannya berbeda-beda, disebut heteroskedastisitas, yang bisa membuat hasil analisis menjadi kurang valid. uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari uji Glejser. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dan model bisa dipercaya. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, berarti ada masalah heteroskedastisitas yang harus diatasi.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.325311	0.052163	5.551234	0.0000
X	-0.003538	0.001202	-2.308613	0.0564
Z	0.005132	0.002724	2.437868	0.0589

Tab 4. 6 Interpretasi Uji Glejser

Variabel	Prob.	Keputusan
Pengangguran (X)	0.0564	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pendidikan (Z)	0.0589	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.6, terlihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel Pengangguran (X) adalah 0,0564 dan untuk variabel Pendidikan (Z) adalah 0,0589. Karena kedua nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model. Artinya, *varians error* pada pengamatan-pengamatan tersebut relatif sama dan model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga hasil analisis bisa dipercaya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan apakah kesalahan dalam model regresi pada satu periode terkait dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Dari hasil uji autokorelasi, jika nilai statistik Durbin-Watson (DW) mendekati angka 2, maka model bebas dari autokorelasi. Namun, jika nilai DW jauh dari 2 (terlalu rendah atau terlalu tinggi), maka kemungkinan ada masalah autokorelasi. Dengan kata lain, uji ini penting agar hasil regresi tidak bias akibat adanya hubungan antar kesalahan yang berurutan dalam data.

Tabel 4. 7 Hasil Uji dengan Durbin-Watson

Uji Autokorelasi	
Durbin-Watson stat	1,966044

Sumber: Data diolah peneliti

Nilai Durbin Watson Stat sebesar 1,966044 menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius. Karena nilai DW mendekati angka 2, artinya tidak ada korelasi yang kuat antara kesalahan pada satu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jadi, hasil regresi ini bisa dianggap valid dan bebas dari autokorelasi yang bisa mengganggu keakuratan analisis.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.616443	0.037148	16.59417	0.0000
X	0.005233	0.003730	3.403069	0.0014

Hasil uji parsial pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk variabel X 3,403069 dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,967007311) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Artinya, variabel X memberikan pengaruh yang nyata dalam model regresi ini.

b. Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 4. 9** Hasil Uji Determinasi (R^2)

Root MSE	0.106016	R-squared	0.752003
Mean dependent var	0.667800	Adjusted R-squared	0.731550
S.D. dependent var	0.132923	S.E. of regression	0.112117
Akaike info criterion	-3.438697	Sum squared resid	3.821363
Schwarz criterion	-3.033279	Log likelihood	280.5785
Hannan-Quinn criter.	-3.277155	F-statistic	4.928326
Durbin-Watson stat	1.966044	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) pada tabel 4.9 menunjukkan nilai sebesar 0.731550. Ini berarti sekitar 73,15% variasi atau perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model. Sedangkan sisanya, sekitar 26,85%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi, model regresi ini sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

c. Uji Moderasi

Tabel 4. 10 Hasil Uji Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.570296	2.156461	0.264459	0.5716
X	0.438789	0.257185	1.706120	0.0000
Z	0.000315	0.017792	0.017721	0.0004
XZ	-0.003563	0.002117	-2.683039	0.0000

Hasil uji moderasi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel interaksi antara pengangguran dan pendidikan (XZ) memiliki nilai t hitung sebesar 2,683039, yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,967007311. Selain itu, nilai probabilitasnya 0,0000, yang artinya sangat signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara pengangguran dan pendidikan berpengaruh secara nyata

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, pengaruh pengangguran terhadap variabel dependen dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan.

Tabel 4. 11 Hasil Output Uji Keseluruhan

	Hipotesis	Variabel Penelitian	t-Statistic	Prob.	Ket.
Pengaruh Langsung	H1	X-Y	3.403069	0.0014	Diterima
Pengaruh Langsung dengan Moderasi	H2	XZ-Y	-2.683039	0.0000	Diterima
	adjusted R Square		0.731550		

Sumber: Eviews 12, data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik beberapa hipotesis diantaranya:

H1: Pengangguran (X) berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y)

Berdasarkan tabel pada tabel 4.8, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak langsung terhadap ketimpangan pendapatan dengan t statistic sebesar $3.403069 > t \text{ tabel } 1,967007311$ dan nilai probabilitas. $0,0000 < 0,05$. Maka dengan demikian, hubungan searah antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa jika pengangguran meningkat (positif) maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat dan signifikan. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak

H2: pendidikan memoderasi pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat pengangguran

Berdasarkan tabel 4.10, hasil pengujian antar variabel menunjukkan nilai t statistik sebesar $2.683039 > t \text{ tabel } 1,967007311$ dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memoderasi pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan, dengan arah moderasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan memperlemah hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, H_2 diterima dan H_0 ditolak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan estimasi model *fixed effect* dengan menggunakan data panel tahunan periode 2015-2024 dalam EViews 12, menunjukkan bahwa variabel pengangguran (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y). Nilai t -statistik sebesar $3.403069 > t \text{ tabel } 1,967007311$ dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. H_1 diterima, yang mengindikasikan bahwa pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh pengangguran, yang artinya semakin tinggi jumlah pengangguran di Indonesia maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena individu yang tidak bekerja cenderung memiliki pendapatan rendah atau bahkan nihil, sementara individu yang bekerja berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan. Temuan ini sesuai dengan teori dari Simon Kuznets yang menyatakan

jika di tahap awal perkembangan ekonomi, ketimpangan pendapatan biasanya naik karena belum semua orang dapat kesempatan kerja yang sama, apalagi jika sektor-sektor modern yang produktif belum bisa menyerap semua tenaga kerja.¹⁰³

Beberapa penelitian juga mendukung hal ini, seperti yang dilakukan oleh Anggia Sekar Putri & Seftia Anggraini dan Mikhael Simalango & Ririt Iriani Sri Setiawati, yang menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena individu yang mengalami pengangguran memiliki keterbatasan kontribusi ekonomi dan pendapatan yang rendah.¹⁰⁴¹⁰⁵

Penelitian ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan penelitian oleh Muhammad Ersad dan Amri Amir Zurgani yang menemukan hasil berbeda, yaitu hubungan negatif antara pengangguran dan ketimpangan, karena di sektor informal banyak pekerja dengan penghasilan rendah yang sebenarnya membuat pendapatan lebih merata walau dalam kondisi ekonomi yang rendah.¹⁰⁶

Dalam pandangan Islam, bekerja itu sangat penting dan bahkan diwajibkan karena dengan bekerja seseorang bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105, Allah SWT., memerintahkan umat manusia untuk bekerja, dan setiap kerja keras akan dibalas dengan kebaikan.

¹⁰³ Manto, Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2024 (Depok: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2024), 6

¹⁰⁴ Anggia Sekar Putri and Seftia Anggraini, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang', *Jurnal Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 7.2 (2024), 107 <<https://doi.org/10.52624/manajerial.v7i2.2438>>

¹⁰⁵ Mikhael Simalango and Ririt Iriani Sri Setiawati, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Gerbangkertosusila," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 433–42, <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24911>.

¹⁰⁶ Ersad, Amir, and Zulgani, "Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan."

Islam juga mengajarkan supaya umatnya tidak hanya bekerja, tapi juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Ini karena bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan serius, bukan sekadar mencari nafkah saja, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.¹⁰⁷

Islam sangat mendorong umatnya untuk aktif dalam berbagai bidang ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan industri, agar produktivitas dan kesejahteraan bisa meningkat. Jadi, bekerja dengan baik dan profesional adalah bentuk cinta dan tanggung jawab kepada Allah SWT., sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menyatakan Allah SWT., menyukai orang yang bekerja dengan serius dan profesional. Dengan begitu, tidak hanya bisa mengurangi pengangguran tapi juga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara yang halal dan berkah.

Jadi, dari sisi ekonomi dan agama, pengangguran adalah masalah yang harus diatasi karena berpengaruh langsung pada ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan banyak lapangan kerja agar lebih banyak orang bisa produktif, mendapat penghasilan layak, dan ketimpangan bisa berkurang sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih adil dan sejahtera.¹⁰⁸

2. Pendidikan memoderasi pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat pengangguran

¹⁰⁷ Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, and Apriza Apriza, “Pengangguran Dalam Perspektif Islam.”

¹⁰⁸ Wahyu Atthoriq, Septriani, and Etik Winarni, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Pengangguran Terhadap PDRB Melalui Kriminalitas Di Indonesia,” *Jurnal Development* 12, no. 2 (2024): 192–160, <https://doi.org/https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.381>.

Berdasarkan estimasi model fixed effect dengan pengujian multivariate regression analysis (MRA) menggunakan data panel tahunan periode 2015-2024 dalam EViews 12, menunjukkan interaksi yang signifikan antara variabel pendidikan (Z) dan variabel pengangguran (X) terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y). nilai t statistik sebesar $-2.683039 > t \text{ tabel } 1,967007311$ dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. H2 diterima, yang mengindikasikan bahwa pendidikan memoderasi hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP),¹⁰⁹ yang mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga indikator utama, yaitu: rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH), dan harapan lama sekolah (HLS). Ketiga indikator ini secara kolektif mencerminkan kualitas pendidikan masyarakat.¹¹⁰ Hubungan ketimpangan pendapatan dan pengangguran, pendidikan yang tinggi baik dari sisi akses maupun kualitas mampu meningkatkan kompetensi individu, memperluas peluang kerja, dan mengurangi kerentanan terhadap pengangguran.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata pendidikan suatu wilayah, baik dilihat dari RLS, AMH, dan HLS, maka semakin lemah pengaruh

¹⁰⁹ Yeni Yulianti and Siti Qomariah, "Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan," *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 203–13, <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3512>.

¹¹⁰ Shadri Isman Lubis, Triana, and Hani, "Faktor-Faktor Penentu Angka Melek Huruf Di Provinsi Gorontalo: Analisis Regresi Linear Berganda."

ketimpangan pendapatan dalam mendorong peningkatan pengangguran.¹¹¹ Pendidikan, dalam hal ini, menjadi instrumen struktural yang tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga melindungi masyarakat dari eksklusi ekonomi akibat distribusi pendapatan yang timpang.¹¹²

Kondisi ini didukung oleh data makro terbaru. Pada Agustus 2024, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai sekitar 144,64 juta jiwa atau sekitar 95% dari total angkatan kerja, sementara jumlah penganggur tercatat sebesar 7,47 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024 yang mencatat TPT sebesar 5,82% dengan jumlah penganggur sekitar 7,2 juta jiwa.¹¹³ Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan tetap menjadi isu struktural. Data gini ratio nasional menunjukkan bahwa pada Maret 2024, angkanya berada di level 0,379, kemudian meningkat menjadi 0,381 pada September 2024.¹¹⁴ Kenaikan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masih belum sepenuhnya merata, sekalipun terdapat perbaikan pada aspek ketenagakerjaan.

Ketimpangan ini tampak nyata antara kelompok yang bekerja dan kelompok yang menganggur. Kelompok dengan pendidikan tinggi cenderung

¹¹¹ Haidar Akhmad Al Barabasi and Hastarini Dwi Atmanti, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017-2023 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 221-234, DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1097>.

¹¹² Puspa Nur Ayda et al., "Analisis Pengaruh Indeks Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat," *Creative Research Journal* 11, no. 1 (2025): 7, <https://doi.org/10.34147/crj.v11i01.392>.

¹¹³ Badan Indonesia, "Jumlah dan Presentase penduduk bekerja dan Pengangguran", Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>

¹¹⁴ Badan Pusat Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024 (Jakarta: Berita Resmi Statistik, 2025), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>

lebih mudah memperoleh pekerjaan formal, pendapatan yang layak, dan perlindungan sosial. Sebaliknya, kelompok berpendidikan rendah lebih rentan terhadap pengangguran, upah rendah, dan kemiskinan.¹¹⁵ Dalam kerangka IPM, keterbatasan pada aspek pendidikan dapat memperkuat lingkaran ketimpangan dan pengangguran karena lemahnya daya saing individu di pasar kerja.¹¹⁶

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam meredam efek negatif ketimpangan terhadap pengangguran. Penelitian-penelitian lain juga mendukung hal ini, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin kecil ketimpangan pendapatan, bahkan di daerah dengan pengangguran tinggi sekalipun.

Hasil penelitian oleh Ashari menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik dapat memperlemah dampak pengangguran terhadap ketimpangan.¹¹⁷ Selain itu, Yifei Qin juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun pendidikan rata-rata mengurangi ketimpangan pendapatan, bahkan di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Artinya, pendidikan memiliki

¹¹⁵ Ananda Dyah Febrianty et al., “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Ketenagakerjaan Tahun 2024,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 03 (2025): 6–7, <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/2415>.

¹¹⁶ Sri Rahayu, Hartiningsih Astuti, and Happy Adianita, “Analisis Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 8, no. 1 (2025): 39–56, <https://doi.org/10.56071/jemes.v8i1.1072>.

¹¹⁷ Nesha Rizky Ashari et al., “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.”

peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁸

Penelitian ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan penelitian oleh Sherly Senja Rindiani, yang menunjukkan bahwa bahwa meskipun pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pendidikan, ketimpangan tetap ada karena akses dan kualitas pendidikan belum merata di semua tempat. Jadi, walaupun pendidikan sangat membantu, jika kualitas dan kesempatan pendidikan tidak merata, maka perannya dalam mengurangi ketimpangan masih terbatas. Singkatnya, pendidikan berperan mengurangi pengaruh negatif pengangguran terhadap ketimpangan, namun efektivitasnya tergantung seberapa baik pendidikan diberikan dan diakses oleh semua orang.¹¹⁹

¹¹⁸ Yifei Qin, "The Relationship between Educational Attainment, Unemployment Rate, and Income Disparity in the United States," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 19 (August 17, 2023): 60–64, <https://doi.org/10.54097/ehss.v19i.10958>.

¹¹⁹ Sherly Senja Rindiani, Fadhlurrahman Ruslan, and Syofriza Sofyan, "Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia," *Jurnal EkonomiTrisakti* 5, no. 1 (2025): 33–44, <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/21552>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini mengkaji analisis pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dengan pendidikan sebagai variabel moderasi. Data diambil dari 34 Provinsi di Indonesia selama lima periode (2015-2024) dengan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap ketimpangan di Indonesia. Artinya semakin tinggi jumlah pengangguran di Indonesia maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan.
2. Analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan jika dimoderasi oleh pendidikan. Artinya pendidikan dapat mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, disampaikan beberapa saran bagi peneliti mendatang yaitu:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

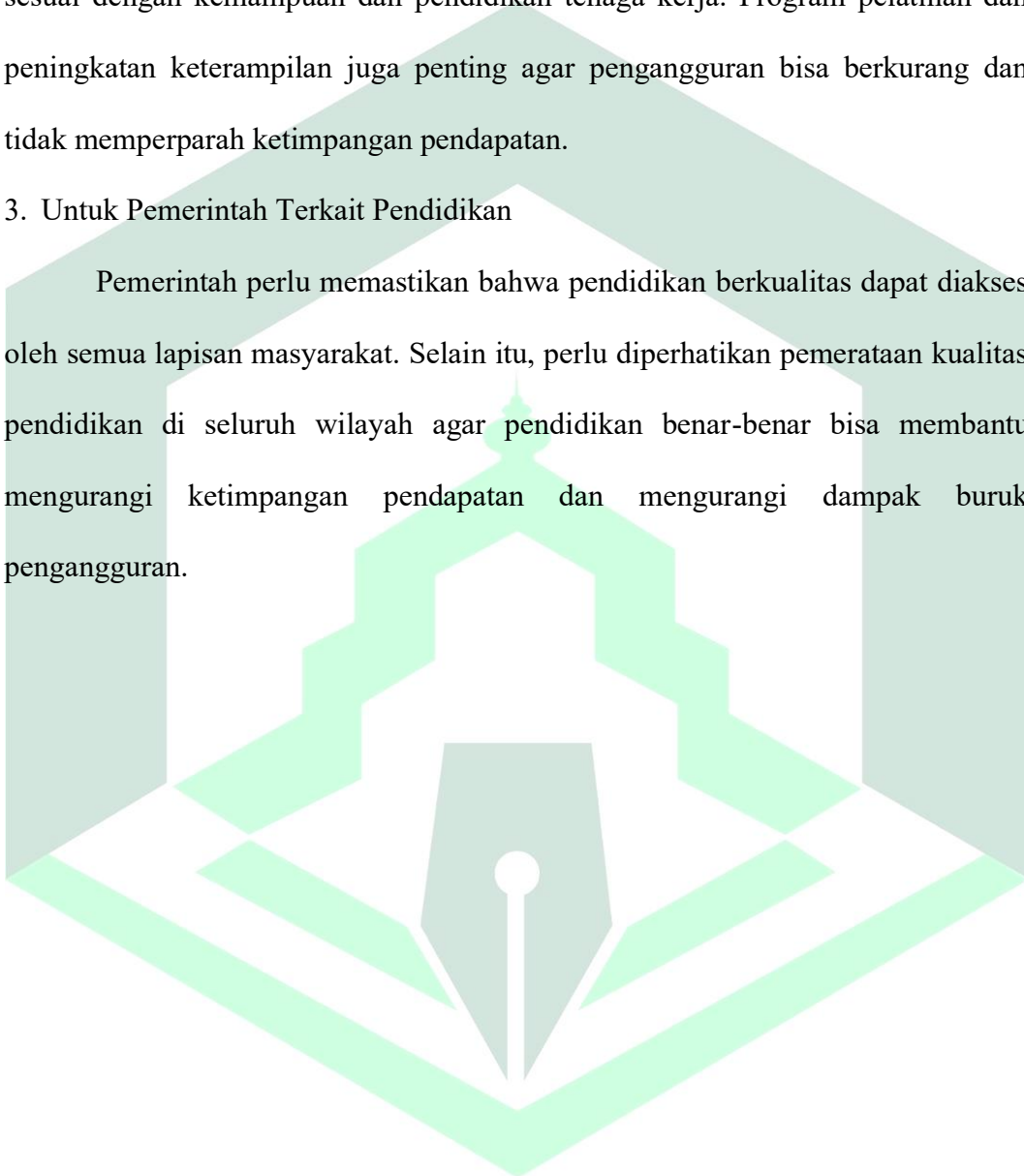
Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang juga dapat memoderasi atau memediasi hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan, seperti kesetaraan gender, perubahan teknologi, kondisi lapangan kerja agar hasil penelitian lebih lengkap dan komprehensif.

2. Untuk Pemerintah Terkait Pengangguran

Pemerintah diharapkan bisa lebih serius menangani masalah pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas, terutama yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikan tenaga kerja. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga penting agar pengangguran bisa berkurang dan tidak memperparah ketimpangan pendapatan.

3. Untuk Pemerintah Terkait Pendidikan

Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, perlu diperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah agar pendidikan benar-benar bisa membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi dampak buruk pengangguran.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*..” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020, n.d.
https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/dokren/narasi_rancangan_awal_rpjmn_2020_2024.pdf.
- Adelia Suryani. “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 48–56.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.661>.
- Adriyanto, Adriyanto, Didi Prasetyo, and Rosmiyati Khodijah. “Angkatan Kerja Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 11, no. 2 (2020): 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>.
- Affriliani, Friscilla Wulan Tersta, and Linardo Pratama. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2025): 418–25.
- Aji, Gunawan, Silma Rohmah, Fadhli Muhtazam, and Adinda Risna Sari. “Pengaruh Indeks Harga Transport, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Persentase Pengangguran Di Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 13.
<https://doi.org/10.8734/musytari.v2i4.1049>.
- Akbar, Muh Asy’ari, and Hari Winarsa. “Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 75–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.70367/arraysiid.v2i2.21>.
- Andiny, Puti, Nursani Adelida, and Rahma Meutia. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa).” *Jurnal Samudera Ekonomika* 3, no. 1 (2021): 47–56.
- Anwar, Kasypul. “Analysis of the Effect of Education and the Gini Ratio on the Unemployment Rate in South Kalimantan.” *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (July 4, 2023): 9–18.
<https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.1993>.
- Ardian, Reki, Yulmardi Yulmardi, and Adi Bhakti. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Ekonomi Aktual* 1, no. 1 (2021): 23–34.
<https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>.

- Ari Pieter Runturambi, Tri Oldy Rotinsulu, Audie O. Niode. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Manado." *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 2 (20AD): 97–108.
- Atthoriq, Wahyu, Septriani, and Etik Winarni. "Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Pengangguran Terhadap PDRB Melalui Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Development* 12, no. 2 (2024): 192–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.381>.
- Ayda, Puspa Nur, Isma Widiaty, Silmi Farhah Fauziah, and Hazman Hiwari. "Analisis Pengaruh Indeks Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat." *Creative Research Journal* 11, no. 1 (2025): 7. <https://doi.org/10.34147/crj.v11i1.392>.
- Bennett, Patrick, Kelly Foley, David A. Green, and Kjell G. Salvanes. "Education and Inequality: An International Perspective." *Fiscal Studies* 45, no. 3 (2024): 429–54. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12394>.
- Chatra, Afdal. *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dalimunthe, Nikmah, and Muhammad Al Amin Bintang. "Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan Uu Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal de Facto* 10, no. 2 (2024): 130–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.178>.
- Darmuji, Darmuji, Tuti Alawiyah, and Khuswatun Hasanah. *Dampak Kualitas Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi: Sebuah Analisis. Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 5, 2024. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i8.3183>.
- Diniyah, Husnud, and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. "Factors Affecting Unemployment Rates In Indonesia." *Journal Of Economics* 2, no. 2 (2024): 155–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50992>.
- Dongoran, Faisal R, Sri Dai Sulfina, Syamsul Allim Syah, and Triana Siahaan. "Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1, no. 2 (2023): 198–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671>.
- Egeten, Maria G., George M.V Kawung, and Krest D.Tolosang. "Analisis

- Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 3 (2023): 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/46512>.
- Ersad, Muhammad Ersad, Amri Amir, and Zulgani Zulgani. “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 2 (September 30, 2022): 425–38. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>.
- et al, Chatra. *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, n.d.
- et al, Frederic Winston Nalle. ““Regional Development Disparity and Mapping of Economic Potential in East Nusa Tenggara Province.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 673.
- Etik Setyorini, Etik Setyorini, and Hanifah Noviandari. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan.” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2022): 47–61. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i1.295>.
- Farhan, Muhammad, and Sugianto Sugianto. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 4 (2022): 243–58. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>.
- Faritz, Miftaqh Nur, and Ady Soejoto. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 1 (2020): 15–21. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>.
- Fasiha, and Muhammad Alwi. “Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan” 9, no. 01 (2023): 14. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3002>.
- Febrianty, Ananda Dyah, Meta Aulya Safara, Naura Syifa, Rakhasa Purniawan, Vidyana Maulida, and Nina Farliana. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Ketenagakerjaan Tahun 2024.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 03 (2025): 6–7. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/2415>.
- Gurusinga, Elverbinta Br, Daisy S.M. Engka, and Krest D Tolosang. “Analisis

- Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 7 (2022): 37–48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/44779>.
- Haidar Akhmad Al Barabasi, and Hastarini Dwi Atmanti. “Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017-2023 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia).” *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 3, no. 1 (January 7, 2025): 221–34. <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1097>.
- Hamid, Rahmad Solling, Samsul Bachri, Salju, and Muhammad Ikbal. *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan EViewa 10*. Banten: CV. AA. Rizky, 2020.
- Harida. “Membangun Kemandirian Ekonomi Umat Melalui Kewirausahaan Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2024): 565–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.183>.
- Hartati, Nani. “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2010-2016.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 01 (2020): 6. <https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946>.
- Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik Republik. *Booklet Sakernas*. Badan Pusat Statistik, 2021.
- Ishak, Khodijah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia,” 2019, 26. <https://www.ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>.
- Istikharoh, Istikharoh, Whinarko Juliprijanto, and Rian Destiningsih. “Education Level Impact Analysis, Minimum Wage And Unemployment Rate On Income Inequality In Special Territory Of Jogyaakarta, 2008-2018.” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2020): 109–25. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399>.
- Istikharoh, Whinarko Juli Prijanto, and Rian Destiningsih. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018.” *Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2018): 109–25. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i1.1399>.
- Kay, Vera Paulin. “Kesenjangan Pendapatan Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Periode 2005-2010.” *Jurnal Administrasi Terapan* 1, no. 1 (2020): 75.
- Koja, Marlince Tara, Adrianus Kabubu Hudang, and Yuniarti Reny Renggo.

- “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 1051–64. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2662>.
- Kriswahyudi, Gugus. “Membangun Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Srikandi Journal of Islamic Economic and Banking* 1, no. 1 (2022): 57–66. <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>.
- Lasiyama Mayasurru et al. *Ekonomi Dan Bisnis Islam Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Li, Zaiyang, Hassan Swedy Lunku, and Shaohua Yang. “Financial Inclusion in the Digital Era: A Key Driver for Reducing Income Inequality.” *Technological and Economic Development of Economy* 31, no. 3 (2025): 706–31. <https://doi.org/10.3846/tede.2025.23068>.
- Lubis, Reniwati, Johni Eka Putra, Tri Widayati, Nurjanna Ladjin, and Adam Hafidz Al Fajar. “Peran Dan Strategi UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 4082–94. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4611>.
- Lubis, Tetti Maisyaroh. “Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3562>.
- Luluwatun Nazla, Rina Sama Iyah Agustina, Siti Nurul Hanapiah, Silva Nuraini, and Lina Marlina. “TRANSFORMASI ERA DIGITAL: PELUANG MENGGALI PEKERJAAN DAN TANTANGAN TERHADAP MENINGKATNYA PENGANGGURAN.” *Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (December 19, 2023): 63–73. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.149>.
- Manto. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2024*. Depok: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2024.
- Mokoagow, Muhammad Ichksanul A, and Andi Mardiana. “Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–8. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10650/pdf>.
- Muafiqie, Humaida. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Pendekatan Makro Dan Mikro)*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023.
- Mukhid, A. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakad Media Publishing. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

- Nesha Rizky Ashari, Syahrul Gunawan, Irwan W, and Nilawati. “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 2 (December 23, 2024): 299. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139>.
- Nissa, Azzuratul, Mohammad Orinaldi, and Faturahman. “Analisis Etos Kerja Islami Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pondok Pesantren Fathul Ulum Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 83–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.250>.
- Nurhayati. *Buku Referensi Ekonomi Pembangunan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Prakoso, Elang Satrio. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2010-2019.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7547>.
- Purnama, Juan Dwi, Subaheri Subaheri, and Deris Desmawan. “Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang.” *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 73. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.53>.
- Putri, Anggia Sekar, and Seftia Anggraini. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang.” *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang* 7, no. 2 (December 23, 2024): 100–109. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v7i2.2438>.
- Putri, Devi Yuliana, and Renca Shinta Aminda. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Of Development Economic and Digitalization* 3, no. 1 (2024): 87–108. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/7667>.
- Qin, Yifei. “The Relationship between Educational Attainment, Unemployment Rate, and Income Disparity in the United States.” *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 19 (August 17, 2023): 60–64. <https://doi.org/10.54097/ehss.v19i.10958>.
- Qomariah, Amini Isti, Syafana Candra Juliansyah, Alifia Tarijul Haq, and Lilis Karwati. “Mengidentifikasi Masalah Sosial Di Masyarakat Dan Mengetahui Teknik Mengatasinya Melalui Sebuah Kajian Literatur” 2, no. 3 (2024): 169–77. <https://mediacendekia.my.id/ojs/index.php/jppm/article/view/184>.

- Rahayu, Sri, Hartiningsih Astuti, and Happy Adianita. "Analisis Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 8, no. 1 (2025): 39–56. <https://doi.org/10.56071/jemes.v8i1.1072>.
- Rahmat, Ahmad Firman, and Badaruddin. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penempatan, Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Takalar." *Nobel Management Review* 4, no. 2 (July 24, 2023): 305. <https://doi.org/10.37476/nmar.v4i2.4031>.
- Raisa, Milenia, and Jovi Iristiawan. "Pengaruh Motivasi Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Departemen Perencanaan & Pengendalian PT PAL Indonesia (Perseo) Kota Surabaya." *Soetomo Management Review* 2, no. 5 (2024): 666–82. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smr/article/view/8210/3966>.
- Reken, Feky, and Audia Junita. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Rianda, Cut Nova. "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>.
- Rindiani, Sherly Senja, Fadhlurrahman Ruslan, and Syofriza Sofyan. "Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 5, no. 1 (2025): 33–44. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/21552>.
- . "Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 5, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/v5i1.21552>.
- Rismayanti. "Analisis Potensi Sektorial Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi." *Gorontalo Development Review (GOLDER)* 4, no. 2 (2021): 77. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev/article/view/1736>.
- Romadona, Dika, Putri Mega Agustin, Muhammad Horiqi, and Umi Fadlilatunnisa. "Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 3, no. 1 (2024): 169–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.2774>.
- S, Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2012.

Samsudin, Agus Rojak, Rizal Maulana, and Premi Anggraini. “Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia ; Telaah Dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah” 3, no. 2 (2024): 115–34. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.62>.

Senja, Trista, Puspita Sari, Dea Riskita, and Nova Lila Febiyanti. “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo Tahun” 4, no. 1 (2024): 203–9. <https://journal-nusantara.id/index.php/EKOMA/article/view/5211>.

Setyanti, Axellina Muara, and Firdaus Finuliyah. “Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 1 (2022): 28. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.118>.

Shadri Isman Lubis, M., Dinie Triana, and Aulia Hani. “Faktor-Faktor Penentu Angka Melek Huruf Di Provinsi Gorontalo: Analisis Regresi Linear Berganda.” *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam* 6, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.8734/trigo.v1i2.365>.

Simalango, Mikhael, and Ririt Iriani Sri Setiawati. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Gerbangkertosusila.” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 433–42. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24911>.

Soelistyo, Aris. *Macroeconometric Model: Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macropudential Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Sosiologi, Mahasiswa. *Ketimpangan Dalam Pembangunan Bunga Rampai Realitas Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.

Sri, Sri Asfirawati Halik. “Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Jenepono.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (February 8, 2021): 46–57. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.39>.

Statistik, Badan Pusat. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Jakarta: Berita Resmi Statistik, 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>.

Sugiasuti, Reika Happy, and Muhammad Rizki Pratama. “Dampak Buruk

Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 16, no. 1 (2022): 79–90. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2022.-16.01.8>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Suparmono. *Pengantar Ekonomi Makro*. Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018.

Titu, Maria Anita. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bali: Penerbit Intelektual Manifest Media, 2023.

Umar, and Tri Haryanto. “Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Masalah Stunting Balita Di Indonesia.” *Media Trend* 14, no. 1 (April 2, 2019): 41–48. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4736>.

Widayati, Tri. *Perekonomian Indonesia (Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Winata, Wahyu Putri Ani, and Muhammad Wakhid Musthofa. “Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 9, no. 03 (2024): 17–19. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i3.23494>.

Yeni Yulianti, and Siti Qomariah. “Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan.” *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 203–13. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3512>.

Yogi, Pradono, and Aritenang. *Pengantar Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Praktis*. Bandung: ITB, 2018.

Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, and Apriza Apriza. “Pengangguran Dalam Perspektif Islam.” *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (June 7, 2024): 90–100. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.185>.

Yulianti, Diana. “Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (August 9, 2021): 125–48. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.131>.



LAMPIRAN-LAMPIRA

Lampiran 1: Data Penelitian

No.	Provinsi	Tahun	X	Z	Y
1	Aceh	2015	17,66	122,47	0,673
2	Aceh	2016	15,7	122,67	0,674
3	Aceh	2017	13,96	123,07	0,658
4	Aceh	2018	12,88	123,28	0,643
5	Aceh	2019	11,65	123,46	0,64
6	Aceh	2020	11,99	123,62	0,642
7	Aceh	2021	12,6	123,72	0,647
8	Aceh	2022	12,14	123,75	0,602
9	Aceh	2023	11,78	123,86	0,296
10	Aceh	2024	11,31	123,95	0,588
11	Sumatera Utara	2015	13,1	121,71	0,662
12	Sumatera Utara	2016	12,33	121,91	0,631
13	Sumatera Utara	2017	12,01	122,15	0,65
14	Sumatera Utara	2018	11,16	122,32	0,629
15	Sumatera Utara	2019	10,96	122,48	0,632
16	Sumatera Utara	2020	11,62	122,67	0,63
17	Sumatera Utara	2021	12,34	122,75	0,627
18	Sumatera Utara	2022	11,63	122,94	0,638
19	Sumatera Utara	2023	11,13	123,25	0,309
20	Sumatera Utara	2024	10,7	123,35	0,603
21	Sumatera Barat	2015	12,88	121,93	0,661

22	Sumatera Barat	2016	10,9	122,31	0,643
23	Sumatera Barat	2017	11,38	122,52	0,63
24	Sumatera Barat	2018	11,34	122,5	0,626
25	Sumatera Barat	2019	10,76	122,82	0,613
26	Sumatera Barat	2020	12,13	122,89	0,606
27	Sumatera Barat	2021	13,19	123,05	0,606
28	Sumatera Barat	2022	12,45	123,15	0,592
29	Sumatera Barat	2023	11,84	123,3	0,28
30	Sumatera Barat	2024	11,54	123,67	0,57
31	Riau	2015	14,55	121,14	0,73
32	Riau	2016	13,37	121,34	0,694
33	Riau	2017	11,98	121,7	0,65
34	Riau	2018	11,53	121,91	0,674
35	Riau	2019	11,12	122,06	0,665
36	Riau	2020	11,24	122,28	0,65
37	Riau	2021	9,38	122,4	0,653
38	Riau	2022	8,77	122,43	0,649
39	Riau	2023	8,48	122,55	0,324
40	Riau	2024	7,55	122,8	0,613
41	Jambi	2015	7,07	120,38	0,705
42	Jambi	2016	8,66	120,7	0,695
43	Jambi	2017	7,54	120,9	0,669
44	Jambi	2018	7,29	121,08	0,669
45	Jambi	2019	7,58	121,34	0,645

46	Jambi	2020	9,39	121,45	0,636
47	Jambi	2021	9,85	121,57	0,636
48	Jambi	2022	9,29	121,63	0,655
49	Jambi	2023	9,03	121,8	0,343
50	Jambi	2024	8,93	121,94	0,636
51	Sumatera Selatan	2015	11,1	119,69	0,694
52	Sumatera Selatan	2016	8,25	119,96	0,71
53	Sumatera Selatan	2017	8,19	120,19	0,726
54	Sumatera Selatan	2018	8,35	120,26	0,699
55	Sumatera Selatan	2019	8,55	120,49	0,67
56	Sumatera Selatan	2020	9,41	120,63	0,677
57	Sumatera Selatan	2021	10,15	120,79	0,681
58	Sumatera Selatan	2022	9,37	120,87	0,669
59	Sumatera Selatan	2023	8,64	121,07	0,338
60	Sumatera Selatan	2024	7,83	121,16	0,664
61	Bengkulu	2015	8,12	121,47	0,747
62	Bengkulu	2016	7,14	121,69	0,711
63	Bengkulu	2017	6,55	121,98	0,7
64	Bengkulu	2018	5,98	122,09	0,717
65	Bengkulu	2019	5,67	122,23	0,669
66	Bengkulu	2020	7,15	122,38	0,657
67	Bengkulu	2021	7,37	122,41	0,647
68	Bengkulu	2022	6,98	122,44	0,63
69	Bengkulu	2023	6,63	122,67	0,333
70	Bengkulu	2024	6,28	122,66	0,685

71	Lampung	2015	8,58	119,69	0,728
72	Lampung	2016	9,16	119,89	0,722
73	Lampung	2017	8,76	120,08	0,667
74	Lampung	2018	8,36	120,28	0,672
75	Lampung	2019	7,98	120,46	0,66
76	Lampung	2020	8,93	120,59	0,647
77	Lampung	2021	9,23	120,71	0,637
78	Lampung	2022	8,83	120,82	0,627
79	Lampung	2023	8,41	120,97	0,324
80	Lampung	2024	8,31	121,04	0,603
81	KEP. Bangka Belitung	2015	9,64	118,94	0,558
82	KEP. Bangka Belitung	2016	8,77	119,12	0,563
83	KEP. Bangka Belitung	2017	8,24	119,41	0,558
84	KEP. Bangka Belitung	2018	7,2	119,6	0,553
85	KEP. Bangka Belitung	2019	6,9	119,78	0,531
86	KEP. Bangka Belitung	2020	8,6	119,98	0,519
87	KEP. Bangka Belitung	2021	10,07	120,1	0,503
88	KEP. Bangka Belitung	2022	8,95	120,17	0,491
89	KEP. Bangka Belitung	2023	8,45	120,53	0,245
90	KEP. Bangka Belitung	2024	8,48	120,78	0,479
91	Kepulauan Riau	2015	15,25	122,23	0,703
92	Kepulauan Riau	2016	16,72	122,27	0,706
93	Kepulauan Riau	2017	13,6	122,51	0,693
94	Kepulauan Riau	2018	15,34	122,59	0,669

95	Kepulauan Riau	2019	14,52	122,77	0,678
96	Kepulauan Riau	2020	16,32	122,9	0,673
97	Kepulauan Riau	2021	20,03	123,07	0,682
98	Kepulauan Riau	2022	16,25	123,32	0,667
99	Kepulauan Riau	2023	14,41	123,42	0,34
100	Kepulauan Riau	2024	13,33	123,73	0,706
101	DKI Jakarta	2015	15,59	123,29	0,852
102	DKI Jakarta	2016	11,89	123,61	0,808
103	DKI Jakarta	2017	12,5	123,84	0,822
104	DKI Jakarta	2018	12,38	123,97	0,784
105	DKI Jakarta	2019	12,04	123,99	0,785
106	DKI Jakarta	2020	16,1	124,07	0,799
107	DKI Jakarta	2021	17,01	124,19	0,82
108	DKI Jakarta	2022	15,18	124,32	0,835
109	DKI Jakarta	2023	14,1	124,69	0,431
110	DKI Jakarta	2024	12,24	124,91	0,854
111	Jawa Barat	2015	17,12	119,94	0,841
112	Jawa Barat	2016	17,46	120,23	0,815
113	Jawa Barat	2017	16,71	120,52	0,796
114	Jawa Barat	2018	16,45	120,59	0,812
115	Jawa Barat	2019	15,82	120,83	0,8
116	Jawa Barat	2020	18,17	121,02	0,801
117	Jawa Barat	2021	18,74	121,19	0,818
118	Jawa Barat	2022	16,66	121,37	0,829
119	Jawa Barat	2023	15,33	121,48	0,425

120	Jawa Barat	2024	13,66	121,64	0,849
121	Jawa Tengah	2015	10,3	119,3	0,764
122	Jawa Tengah	2016	8,83	119,46	0,723
123	Jawa Tengah	2017	8,72	119,71	0,73
124	Jawa Tengah	2018	8,66	119,86	0,735
125	Jawa Tengah	2019	8,63	120,13	0,719
126	Jawa Tengah	2020	10,68	120,34	0,721
127	Jawa Tengah	2021	11,91	120,49	0,74
128	Jawa Tengah	2022	11,32	120,7	0,74
129	Jawa Tengah	2023	10,37	120,81	0,369
130	Jawa Tengah	2024	9,17	120,81	0,731
131	DI Yogyakarta	2015	8,14	123,95	0,853
132	DI Yogyakarta	2016	5,53	124,31	0,845
133	DI Yogyakarta	2017	5,86	124,55	0,872
134	DI Yogyakarta	2018	6,37	124,88	0,863
135	DI Yogyakarta	2019	6,07	124,96	0,851
136	DI Yogyakarta	2020	7,95	125,07	0,871
137	DI Yogyakarta	2021	8,84	125,21	0,877
138	DI Yogyakarta	2022	7,79	125,33	0,898
139	DI Yogyakarta	2023	7,27	125,44	0,449
140	DI Yogyakarta	2024	6,72	125,55	0,863
141	Jawa Timur	2015	8,78	119,64	0,818
142	Jawa Timur	2016	8,35	120,01	0,804
143	Jawa Timur	2017	8,1	120,25	0,811

144	Jawa Timur	2018	7,68	120,37	0,75
145	Jawa Timur	2019	7,59	120,66	0,734
146	Jawa Timur	2020	9,44	123,31	0,73
147	Jawa Timur	2021	10,91	121,19	0,738
148	Jawa Timur	2022	10,3	121,34	0,736
149	Jawa Timur	2023	9,21	121,43	0,387
150	Jawa Timur	2024	7,93	121,66	0,745
151	Banten	2015	3,36	120,56	0,787
152	Banten	2016	4,01	121,03	0,786
153	Banten	2017	2,76	121,28	0,761
154	Banten	2018	2,28	121,45	0,752
155	Banten	2019	2,79	121,59	0,726
156	Banten	2020	18,63	121,72	0,728
157	Banten	2021	17,99	121,89	0,728
158	Banten	2022	16,62	122,09	0,74
159	Banten	2023	15,49	122,15	0,368
160	Banten	2024	13,7	122,24	0,712
161	Bali	2015	10,67	121,07	0,776
162	Bali	2016	7,6	121,25	0,74
163	Bali	2017	7,18	121,59	0,763
164	Bali	2018	6,86	121,8	0,741
165	Bali	2019	6,43	122,04	0,736
166	Bali	2020	6,88	122,22	0,738
167	Bali	2021	10,79	122,41	0,753

168	Bali	2022	9,64	122,81	0,725
169	Bali	2023	6,42	122,95	0,362
170	Bali	2024	3,66	123,08	0,709
171	Nusa Tenggara Barat	2015	10,67	119,6	0,728
172	Nusa Tenggara Barat	2016	7,6	119,74	0,724
173	Nusa Tenggara Barat	2017	7,18	120,14	0,749
174	Nusa Tenggara Barat	2018	6,86	120,25	0,763
175	Nusa Tenggara Barat	2019	6,43	120,67	0,753
176	Nusa Tenggara Barat	2020	7,26	120,94	0,762
177	Nusa Tenggara Barat	2021	6,98	121,2	0,765
178	Nusa Tenggara Barat	2022	6,81	121,45	0,747
179	Nusa Tenggara Barat	2023	6,53	121,53	0,375
180	Nusa Tenggara Barat	2024	6,03	121,68	0,725
181	Nusa tengga Timur	2015	6,95	118,22	0,687
182	Nusa tengga Timur	2016	6,84	118,5	0,698
183	Nusa tengga Timur	2017	6,48	118,71	0,718
184	Nusa tengga Timur	2018	5,67	118,91	0,71
185	Nusa tengga Timur	2019	6,12	119,5	0,711
186	Nusa tengga Timur	2020	6,92	119,7	0,71
187	Nusa tengga Timur	2021	7,15	119,86	0,685
188	Nusa tengga Timur	2022	6,84	120,18	0,674
189	Nusa tengga Timur	2023	6,24	120,64	0,325
190	Nusa tengga Timur	2024	6,19	120,88	0,632
191	Kalimantan Barat	2015	9,93	118,87	0,664

192	Kalimantan Barat	2016	8,81	118,96	0,672
193	Kalimantan Barat	2017	8,58	119,23	0,656
194	Kalimantan Barat	2018	8,27	119,46	0,664
195	Kalimantan Barat	2019	8,41	119,73	0,645
196	Kalimantan Barat	2020	10,28	119,83	0,642
197	Kalimantan Barat	2021	11,55	119,97	0,628
198	Kalimantan Barat	2022	9,97	120,14	0,625
199	Kalimantan Barat	2023	9,57	120,3	0,321
200	Kalimantan Barat	2024	9,06	120,37	0,624
201	Kalimantan Tengah	2015	7,68	120,09	0,626
202	Kalimantan Tengah	2016	8,49	120,35	0,677
203	Kalimantan Tengah	2017	7,36	120,63	0,67
204	Kalimantan Tengah	2018	7,05	120,77	0,686
205	Kalimantan Tengah	2019	7,25	120,92	0,671
206	Kalimantan Tengah	2020	7,91	121,11	0,649
207	Kalimantan Tengah	2021	8,78	121,24	0,643
208	Kalimantan Tengah	2022	8,46	121,25	0,628
209	Kalimantan Tengah	2023	7,94	121,27	0,317
210	Kalimantan Tengah	2024	7,68	121,38	0,605
211	Kalimantan Selatan	2015	9,75	119,9	0,687
212	Kalimantan Selatan	2016	9,08	120,12	0,683
213	Kalimantan Selatan	2017	8,3	120,37	0,694
214	Kalimantan Selatan	2018	8,07	120,41	0,684
215	Kalimantan Selatan	2019	7,59	120,59	0,668

216	Kalimantan Selatan	2020	8,41	120,89	0,683
217	Kalimantan Selatan	2021	9,28	121,07	0,655
218	Kalimantan Selatan	2022	8,94	121,2	0,626
219	Kalimantan Selatan	2023	8,26	121,34	0,313
220	Kalimantan Selatan	2024	8,09	121,42	0,6
221	Kalimantan Timur	2015	14,67	122,33	0,631
222	Kalimantan Timur	2016	16,81	122,59	0,643
223	Kalimantan Timur	2017	15,46	122,77	0,663
224	Kalimantan Timur	2018	13,2	123,15	0,684
225	Kalimantan Timur	2019	12,59	123,39	0,665
226	Kalimantan Timur	2020	13,59	123,45	0,663
227	Kalimantan Timur	2021	13,64	123,6	0,665
228	Kalimantan Timur	2022	12,48	123,72	0,644
229	Kalimantan Timur	2023	11,68	123,96	0,322
230	Kalimantan Timur	2024	10,89	123,99	0,631
231	Kalimantan Utara	2015	11,47	120,22	0,608
232	Kalimantan Utara	2016	9,15	120,36	0,605
233	Kalimantan Utara	2017	10,71	120,83	0,621
234	Kalimantan Utara	2018	9,81	121,03	0,607
235	Kalimantan Utara	2019	10,33	121,46	0,587
236	Kalimantan Utara	2020	10,68	121,53	0,592
237	Kalimantan Utara	2021	9,25	121,64	0,577
238	Kalimantan Utara	2022	8,95	121,93	0,542
239	Kalimantan Utara	2023	8,11	122,13	0,277

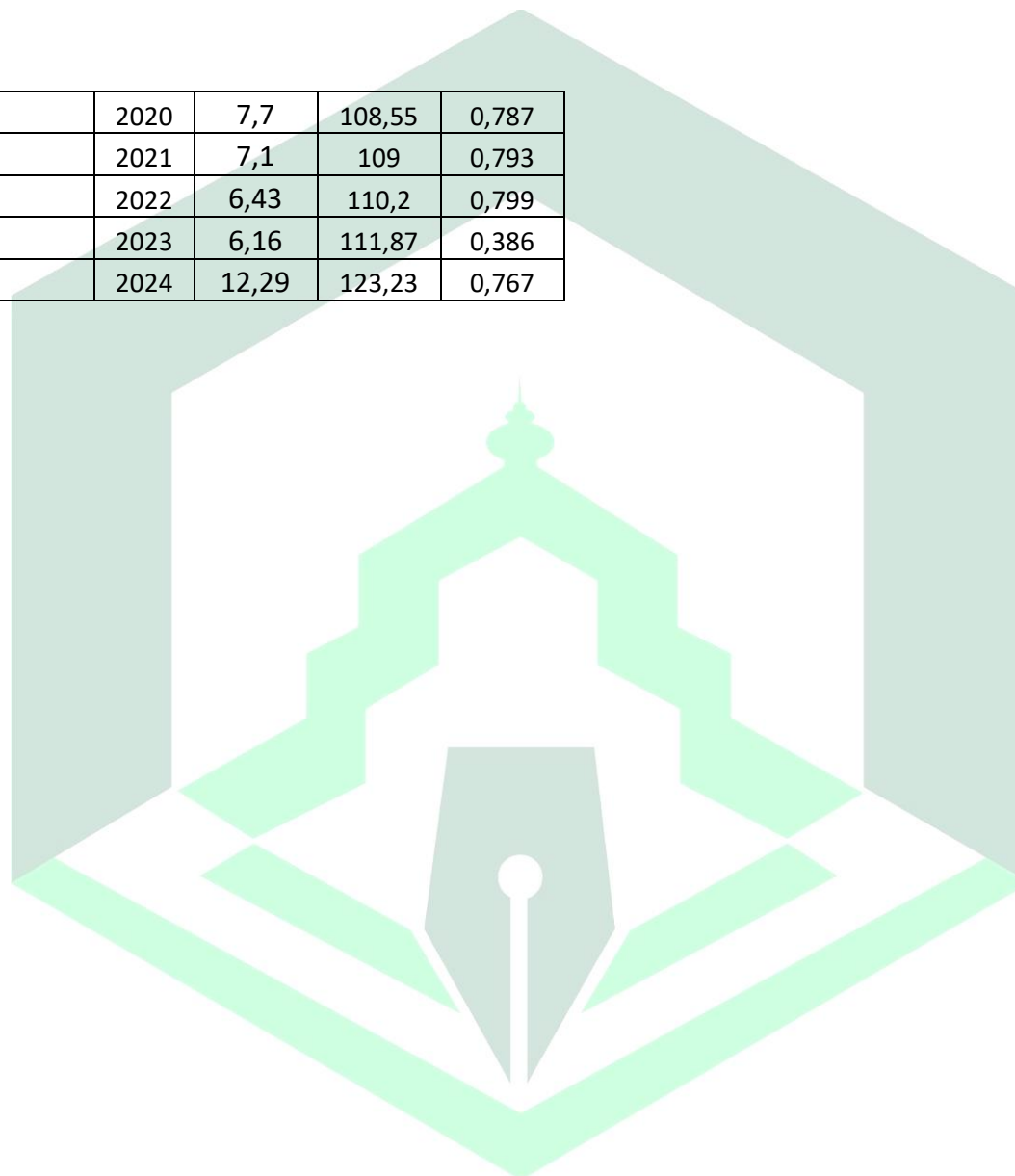
240	Kalimantan Utara	2024	7,91	122,26	0,523
241	Sulawesi Utara	2015	17,72	121,23	0,734
242	Sulawesi Utara	2016	14	121,34	0,765
243	Sulawesi Utara	2017	13,3	121,67	0,79
244	Sulawesi Utara	2018	12,47	121,87	0,766
245	Sulawesi Utara	2019	11,18	122,11	0,743
246	Sulawesi Utara	2020	12,71	122,26	0,738
247	Sulawesi Utara	2021	14,34	122,46	0,724
248	Sulawesi Utara	2022	13,12	122,54	0,724
249	Sulawesi Utara	2023	12,29	122,66	0,37
250	Sulawesi Utara	2024	11,83	122,72	0,707
251	Sulawesi Tengah	2015	7,09	120,27	0,744
252	Sulawesi Tengah	2016	6,75	120,56	0,709
253	Sulawesi Tengah	2017	6,78	120,87	0,7
254	Sulawesi Tengah	2018	6,49	121,33	0,663
255	Sulawesi Tengah	2019	6,57	121,7	0,657
256	Sulawesi Tengah	2020	6,7	121,8	0,647
257	Sulawesi Tengah	2021	7,48	121,94	0,642
258	Sulawesi Tengah	2022	6,67	122,03	0,613
259	Sulawesi Tengah	2023	6,44	122,1	0,304
260	Sulawesi Tengah	2024	6,09	122,2	0,61
261	Sulawesi Selatan	2015	11,76	120,02	0,828
262	Sulawesi Selatan	2016	9,91	120,25	0,826
263	Sulawesi Selatan	2017	10,38	120,57	0,836

264	Sulawesi Selatan	2018	9,98	120,84	0,785
265	Sulawesi Selatan	2019	9,72	121,3	0,78
266	Sulawesi Selatan	2020	12,01	121,56	0,771
267	Sulawesi Selatan	2021	11,51	121,76	0,759
268	Sulawesi Selatan	2022	10,26	121,96	0,742
269	Sulawesi Selatan	2023	9,59	122,17	0,377
270	Sulawesi Selatan	2024	9,09	122,28	0,723
271	Sulawesi Tenggara	2015	9,17	120,8	0,78
272	Sulawesi Tenggara	2016	6,5	121,11	0,79
273	Sulawesi Tenggara	2017	6,44	121,54	0,798
274	Sulawesi Tenggara	2018	5,96	121,97	0,801
275	Sulawesi Tenggara	2019	6,4	122,38	0,792
276	Sulawesi Tenggara	2020	7,68	122,62	0,777
277	Sulawesi Tenggara	2021	8,14	122,72	0,784
278	Sulawesi Tenggara	2022	7,22	122,85	0,753
279	Sulawesi Tenggara	2023	6,81	122,81	0,371
280	Sulawesi Tenggara	2024	6,31	122,96	0,735
281	Gorontalo	2015	7,71	119,32	0,821
282	Gorontalo	2016	6,64	119,61	0,829
283	Gorontalo	2017	7,93	120,02	0,835
284	Gorontalo	2018	7,08	120,33	0,82
285	Gorontalo	2019	7,01	120,61	0,817
286	Gorontalo	2020	7,57	120,77	0,814
287	Gorontalo	2021	6,42	120,88	0,817

288	Gorontalo	2022	5,83	120,99	0,841
289	Gorontalo	2023	6,13	121,04	0,417
290	Gorontalo	2024	6,18	121,22	0,827
291	Sulawesi Barat	2015	5,16	118,47	0,725
292	Sulawesi Barat	2016	6,05	118,75	0,735
293	Sulawesi Barat	2017	6,19	119,05	0,693
294	Sulawesi Barat	2018	5,34	119,5	0,736
295	Sulawesi Barat	2019	4,27	119,84	0,73
296	Sulawesi Barat	2020	5,71	120,13	0,72
297	Sulawesi Barat	2021	6,41	120,32	0,722
298	Sulawesi Barat	2022	5,45	120,47	0,733
299	Sulawesi Barat	2023	5,31	121,79	0,351
300	Sulawesi Barat	2024	5,7	120,64	0,684
301	Maluku	2015	16,65	122,28	0,678
302	Maluku	2016	14,03	122,61	0,692
303	Maluku	2017	17,06	122,89	0,664
304	Maluku	2018	14,02	123,18	0,669
305	Maluku	2019	13,3	123,65	0,644
306	Maluku	2020	14,28	123,79	0,644
307	Maluku	2021	13,66	123,89	0,63
308	Maluku	2022	13,32	124,1	0,607
309	Maluku	2023	12,39	123,04	0,288
310	Maluku	2024	12,07	124,29	0,573
311	Maluku Utara	2015	11,61	121,2	0,566

312	Maluku Utara	2016	7,44	121,7	0,595
313	Maluku Utara	2017	10,15	121,88	0,647
314	Maluku Utara	2018	9,19	122,24	0,664
315	Maluku Utara	2019	9,77	122,57	0,622
316	Maluku Utara	2020	9,24	122,66	0,598
317	Maluku Utara	2021	9,77	122,62	0,578
318	Maluku Utara	2022	8,96	122,84	0,588
319	Maluku Utara	2023	8,91	122,88	0,3
320	Maluku Utara	2024	8,19	123,04	0,612
321	Papua Barat	2015	12,69	118,55	0,868
322	Papua Barat	2016	13,19	118,73	0,774
323	Papua Barat	2017	14,01	118,99	0,777
324	Papua Barat	2018	12,72	119,27	0,785
325	Papua Barat	2019	12,24	119,65	0,767
326	Papua Barat	2020	13,58	120,03	0,758
327	Papua Barat	2021	12,02	120,38	0,754
328	Papua Barat	2022	11,15	120,71	0,754
329	Papua Barat	2023	10,91	120,93	0,37
330	Papua Barat	2024	8,44	120,79	0,774
331	Papua	2015	7,71	103,05	0,813
332	Papua	2016	6,32	103,5	0,789
333	Papua	2017	7,58	104,32	0,795
334	Papua	2018	5,75	105,79	0,782
335	Papua	2019	6,73	108,09	0,785

336	Papua	2020	7,7	108,55	0,787
337	Papua	2021	7,1	109	0,793
338	Papua	2022	6,43	110,2	0,799
339	Papua	2023	6,16	111,87	0,386
340	Papua	2024	12,29	123,23	0,767



Lampiran 2: Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)																			
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu
1	Aceh	7,73	9,93	8,13	7,57	7,39	6,57	6,54	6,34	5,48	6,17	5,4	6,59	6,3	6,3	5,97	6,17	5,75	6,03	5,56	5,75
2	Sumatera Utara	6,39	6,71	6,49	5,84	6,41	5,6	5,61	5,55	5,57	5,39	4,71	6,91	6,01	6,33	5,47	6,16	5,24	5,89	5,1	5,6
3	Sumatera Barat	5,99	6,89	5,81	5,09	5,8	5,58	5,68	5,66	5,38	5,38	5,25	6,88	6,67	6,52	6,17	6,28	5,9	5,94	5,79	5,75
4	Riau	6,72	7,83	5,94	7,43	5,76	6,22	5,55	5,98	5,36	5,76	4,92	6,32	4,96	4,42	4,4	4,37	4,25	4,23	3,85	3,7
5	Jambi	2,73	4,34	4,66	4	3,67	3,87	3,56	3,73	3,52	4,06	4,26	5,13	4,76	5,09	4,7	4,59	4,5	4,53	4,45	4,48
6	Sumatera Selatan	5,03	6,07	3,94	4,31	3,8	4,39	4,08	4,27	4,02	4,53	3,9	5,51	5,17	4,98	4,74	4,63	4,53	4,11	3,97	3,86
7	Bengkulu	3,21	4,91	3,84	3,3	2,81	3,74	2,63	3,35	2,41	3,26	3,08	4,07	3,72	3,65	3,39	3,59	3,21	3,42	3,17	3,11
8	Lampung	3,44	5,14	4,54	4,62	4,43	4,33	4,32	4,04	3,95	4,03	4,26	4,67	4,54	4,69	4,31	4,52	4,18	4,23	4,12	4,19
9	KEP. Bangka Belitung	3,35	6,29	6,17	2,6	4,46	3,78	3,59	3,61	3,32	3,58	3,35	5,25	5,04	5,03	4,18	4,77	3,89	4,56	3,85	4,63
10	Kepulauan Riau	9,05	6,2	9,03	7,69	6,44	7,16	7,3	8,04	7,02	7,5	5,98	10,34	10,12	9,91	8,02	8,23	7,61	6,8	6,94	6,39
11	DKI Jakarta	8,36	7,23	5,77	6,12	5,36	7,14	5,73	6,65	5,5	6,54	5,15	10,95	8,51	8,5	8	7,18	7,57	6,53	6,03	6,21
12	Jawa Barat	8,4	8,72	8,57	8,89	8,49	8,22	8,22	8,23	7,78	8,04	7,71	10,46	8,92	9,82	8,35	8,31	7,89	7,44	6,91	6,75
13	Jawa Tengah	5,31	4,99	4,2	4,63	4,15	4,57	4,19	4,47	4,19	4,44	4,2	6,48	5,96	5,95	5,75	5,57	5,24	5,13	4,39	4,78
14	DI Yogyakarta	4,07	4,07	2,81	2,72	2,84	3,02	3	3,37	2,89	3,18	3,38	4,57	4,28	4,56	3,73	4,06	3,58	3,69	3,24	3,48
15	Jawa Timur	4,31	4,47	4,14	4,21	4,1	4	3,77	3,91	3,77	3,82	3,6	5,84	5,17	5,74	4,81	5,49	4,33	4,88	3,74	4,19
16	Banten	8,58	9,55	7,95	8,92	7,75	9,28	7,72	8,47	7,55	8,11	7,99	10,64	9,01	8,98	8,53	8,09	7,97	7,52	7,02	6,68
17	Bali	1,37	1,99	2,12	1,89	1,28	1,48	0,88	1,4	1,22	1,57	1,25	5,63	5,42	5,37	4,84	4,8	3,73	2,69	1,87	1,79
18	Nusa Tenggara Barat	4,98	5,69	3,66	3,94	3,86	3,32	3,28	3,58	3,15	3,28	3,04	4,22	3,97	3,01	3,92	2,89	3,73	2,8	3,3	2,73
19	Nusa Tenggara Timur	3,12	3,83	3,59	3,25	3,21	3,27	2,82	2,85	2,98	3,14	2,64	4,28	3,38	3,77	3,3	3,54	3,1	3,14	3,17	3,02

20	Kalimantan Barat	4,78	5,15	4,58	4,23	4,22	4,36	4,09	4,18	4,06	4,35	4,47	5,81	5,73	5,82	4,86	5,11	4,52	5,05	4,2	4,86
21	Kalimantan Tengah	3,14	4,54	3,67	4,82	3,13	4,23	3,14	3,91	3,21	4,04	3,33	4,58	4,25	4,53	4,2	4,26	3,84	4,1	3,67	4,01
22	Kalimantan Selatan	4,83	4,92	3,63	5,45	3,53	4,77	3,72	4,35	3,41	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,2	4,74	3,95	4,31	3,89	4,2
23	Kalimantan Timur	7,17	7,5	8,86	7,95	8,55	6,91	6,79	6,41	6,65	5,94	6,72	6,87	6,81	6,83	6,77	5,71	6,37	5,31	5,75	5,14
24	Kalimantan Utara	5,79	5,68	3,92	5,23	5,17	5,54	4,7	5,11	5,84	4,49	5,71	4,97	4,67	4,58	4,62	4,33	4,1	4,01	4,01	3,9
25	Sulawesi Utara	8,69	9,03	7,82	6,18	6,12	7,18	5,86	6,61	5,17	6,01	5,34	7,37	7,28	7,06	6,51	6,61	6,19	6,1	5,98	5,85
26	Sulawesi Tengah	2,99	4,1	3,46	3,29	2,97	3,81	3,12	3,37	3,46	3,11	2,93	3,77	3,73	3,75	3,67	3	3,49	2,95	3,15	2,94
27	Sulawesi Selatan	5,81	5,95	5,11	4,8	4,77	5,61	5,04	4,94	5,1	4,62	5,7	6,31	5,79	5,72	5,75	4,51	5,26	4,33	4,9	4,19
28	Sulawesi Tenggara	3,62	5,55	3,78	2,72	3,14	3,3	2,77	3,19	2,88	3,52	3,1	4,58	4,22	3,92	3,86	3,36	3,66	3,15	3,22	3,09
29	Gorontalo	3,06	4,65	3,88	2,76	3,65	4,28	3,38	3,7	3,25	3,76	3,29	4,28	3,41	3,01	3,25	2,58	3,07	3,06	3,05	3,13
30	Sulawesi Barat	1,81	3,35	2,72	3,33	2,98	3,21	2,33	3,01	1,29	2,98	2,39	3,32	3,28	3,13	3,11	2,34	3,04	2,27	3,02	2,68
31	Maluku	6,72	9,93	6,98	7,05	7,77	9,29	7,07	6,95	6,61	6,69	6,71	7,57	6,73	6,93	6,44	6,88	6,08	6,31	5,96	6,11
32	Maluku Utara	5,56	6,05	3,43	4,01	4,82	5,33	4,56	4,63	4,96	4,81	4,09	5,15	5,06	4,71	4,98	3,98	4,6	4,31	4,16	4,03
33	Papua Barat	4,61	8,08	5,73	7,46	7,52	6,49	6,27	6,45	5,81	6,43	6,78	6,8	6,18	5,84	5,78	5,37	5,53	5,38	4,31	4,13
34	Papua	3,72	3,99	2,97	3,35	3,96	3,62	2,75	3	3,22	3,51	3,42	4,28	3,77	3,33	3,6	2,83	3,49	2,67	5,81	6,48
35	Indonesia	5,81	6,18	5,5	5,61	5,33	5,5	5,1	5,3	4,98	5,23	4,94	7,07	6,26	6,49	5,83	5,86	5,45	5,32	4,82	4,91

Lampiran 3: Gini Rasio

No	GINI RATIO																				
		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D		K + D	
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
1	Aceh	0,334	0,339	0,333	0,341	0,329	0,329	0,325	0,318	0,319	0,321	0,323	0,319	0,324	0,323	0,311	0,291	0,296	-	0,294	0,294
2	Sumatera Utara	0,336	0,326	0,319	0,312	0,315	0,335	0,318	0,311	0,317	0,315	0,316	0,314	0,314	0,313	0,312	0,326	0,309	-	0,297	0,306
3	Sumatera Barat	0,342	0,319	0,331	0,312	0,318	0,312	0,321	0,305	0,306	0,307	0,305	0,301	0,306	0,3	0,3	0,292	0,28	-	0,283	0,287
4	Riau	0,364	0,366	0,347	0,347	0,325	0,325	0,327	0,347	0,334	0,331	0,329	0,321	0,326	0,327	0,326	0,323	0,324	-	0,307	0,306
5	Jambi	0,361	0,344	0,349	0,346	0,335	0,334	0,334	0,335	0,321	0,324	0,32	0,316	0,321	0,315	0,32	0,335	0,343	-	0,321	0,315
6	Sumatera Selatan	0,36	0,334	0,348	0,362	0,361	0,365	0,358	0,341	0,331	0,339	0,339	0,338	0,341	0,34	0,339	0,33	0,338	-	0,333	0,331
7	Bengkulu	0,376	0,371	0,357	0,354	0,351	0,349	0,362	0,355	0,34	0,329	0,334	0,323	0,326	0,321	0,315	0,315	0,333	-	0,342	0,343
8	Lampung	0,376	0,352	0,364	0,358	0,334	0,333	0,346	0,326	0,329	0,331	0,327	0,32	0,323	0,314	0,314	0,313	0,324	-	0,302	0,301
9	KEP. Bangka Belitung	0,283	0,275	0,275	0,288	0,282	0,276	0,281	0,272	0,269	0,262	0,262	0,257	0,256	0,247	0,236	0,255	0,245	-	0,244	0,235
10	Kepulauan Riau	0,364	0,339	0,354	0,352	0,334	0,359	0,33	0,339	0,341	0,337	0,339	0,334	0,343	0,339	0,342	0,325	0,34	-	0,349	0,357
11	DKI Jakarta	0,431	0,421	0,411	0,397	0,413	0,409	0,394	0,39	0,394	0,391	0,399	0,4	0,409	0,411	0,423	0,412	0,431	-	0,423	0,431
12	Jawa Barat	0,415	0,426	0,413	0,402	0,403	0,393	0,407	0,405	0,402	0,398	0,403	0,398	0,412	0,406	0,417	0,412	0,425	-	0,421	0,428
13	Jawa Tengah	0,382	0,382	0,366	0,357	0,365	0,365	0,378	0,357	0,361	0,358	0,362	0,359	0,372	0,368	0,374	0,366	0,369	-	0,367	0,364
14	DI Yogyakarta	0,433	0,42	0,42	0,425	0,432	0,44	0,441	0,422	0,423	0,428	0,434	0,437	0,441	0,436	0,439	0,459	0,449	-	0,435	0,428
15	Jawa Timur	0,415	0,403	0,402	0,402	0,396	0,415	0,379	0,371	0,37	0,364	0,366	0,364	0,374	0,364	0,371	0,365	0,387	-	0,372	0,373
16	Banten	0,401	0,386	0,394	0,392	0,382	0,379	0,385	0,367	0,365	0,361	0,363	0,365	0,365	0,363	0,363	0,377	0,368	-	0,353	0,359
17	Bali	0,377	0,399	0,366	0,374	0,384	0,379	0,377	0,364	0,366	0,37	0,369	0,369	0,378	0,375	0,363	0,362	0,362	-	0,361	0,348
18	Nusa Tenggara Barat	0,368	0,36	0,359	0,365	0,371	0,378	0,372	0,391	0,379	0,374	0,376	0,386	0,381	0,384	0,373	0,374	0,375	-	0,361	0,364

19	Nusa tengga Timur	0,339	0,348	0,336	0,362	0,359	0,359	0,351	0,359	0,356	0,355	0,354	0,356	0,346	0,339	0,334	0,34	0,325	-	0,316	0,316
20	Kalimantan Barat	0,334	0,33	0,341	0,331	0,327	0,329	0,339	0,325	0,327	0,318	0,317	0,325	0,313	0,315	0,314	0,311	0,321	-	0,31	0,314
21	Kalimantan Tengah	0,326	0,3	0,33	0,347	0,343	0,327	0,342	0,344	0,336	0,335	0,329	0,32	0,323	0,32	0,319	0,309	0,317	-	0,301	0,304
22	Kalimantan Selatan	0,353	0,334	0,332	0,351	0,347	0,347	0,344	0,34	0,334	0,334	0,332	0,351	0,33	0,325	0,317	0,309	0,313	-	0,302	0,298
23	Kalimantan Timur	0,316	0,315	0,315	0,328	0,33	0,333	0,342	0,342	0,33	0,335	0,328	0,335	0,334	0,331	0,327	0,317	0,322	-	0,321	0,31
24	Kalimantan Utara	0,294	0,314	0,3	0,305	0,308	0,313	0,303	0,304	0,295	0,292	0,292	0,3	0,292	0,285	0,272	0,27	0,277	-	0,264	0,259
25	Sulawesi Utara	0,368	0,366	0,386	0,379	0,396	0,394	0,394	0,372	0,367	0,376	0,37	0,368	0,365	0,359	0,365	0,359	0,37	-	0,36	0,347
26	Sulawesi Tengah	0,374	0,37	0,362	0,347	0,355	0,345	0,346	0,317	0,327	0,33	0,326	0,321	0,316	0,326	0,308	0,305	0,304	-	0,301	0,309
27	Sulawesi Selatan	0,424	0,404	0,426	0,4	0,407	0,429	0,397	0,388	0,389	0,391	0,389	0,382	0,382	0,377	0,377	0,365	0,377	-	0,363	0,36
28	Sulawesi Tenggara	0,399	0,381	0,402	0,388	0,394	0,404	0,409	0,392	0,399	0,393	0,389	0,388	0,39	0,394	0,387	0,366	0,371	-	0,37	0,365
29	Gorontalo	0,42	0,401	0,419	0,41	0,43	0,405	0,403	0,417	0,407	0,41	0,408	0,406	0,408	0,409	0,418	0,423	0,417	-	0,414	0,413
30	Sulawesi Barat	0,363	0,362	0,364	0,371	0,354	0,339	0,37	0,366	0,365	0,365	0,364	0,356	0,356	0,366	0,362	0,371	0,351	-	0,354	0,33
31	Maluku	0,34	0,338	0,348	0,344	0,343	0,321	0,343	0,326	0,324	0,32	0,318	0,326	0,314	0,316	0,301	0,306	0,288	-	0,282	0,291
32	Maluku Utara	0,28	0,286	0,286	0,309	0,317	0,33	0,328	0,336	0,312	0,31	0,308	0,29	0,3	0,278	0,279	0,309	0,3	-	0,316	0,296
33	Papua Barat	0,44	0,428	0,373	0,401	0,39	0,387	0,394	0,391	0,386	0,381	0,382	0,376	0,38	0,374	0,37	0,384	0,37	-	0,389	0,385
34	Papua	0,421	0,392	0,39	0,399	0,397	0,398	0,384	0,398	0,394	0,391	0,392	0,395	0,397	0,396	0,406	0,393	0,386	-	0,362	0,405
35	Indonesia	0,408	0,402	0,397	0,394	0,393	0,391	0,389	0,384	0,382	0,38	0,381	0,385	0,384	0,381	0,384	0,381	0,388	-	0,379	0,381

Lampiran 3: Angka Melek Aksara

No	Angka Melek Aksara										
	Provinsi	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	99,97	99,92	99,96	99,92	99,98	99,98	99,99	99,94	99,93	99,92
2	Sumatera Utara	99,86	99,79	99,8	99,84	99,88	99,9	99,9	99,92	99,95	99,93
3	Sumatera Barat	99,91	99,93	99,86	99,79	99,89	99,88	99,89	99,87	99,91	99,93
4	Riau	99,91	99,89	99,91	99,88	99,89	99,94	99,93	99,92	99,93	99,95
5	Jambi	99,85	99,91	99,88	99,95	99,96	99,92	99,93	99,9	99,86	99,9
6	Sumatera Selatan	99,9	99,9	99,85	99,9	99,92	99,94	99,95	99,95	99,94	99,95
7	Bengkulu	100	99,94	99,94	99,9	99,91	99,93	99,87	99,85	99,9	99,87
8	Lampung	99,88	99,91	99,83	99,85	99,91	99,89	99,9	99,9	99,91	99,9
9	KEP. Bangka Belitung	99,88	99,79	99,8	99,89	99,86	99,87	99,85	99,88	99,97	99,96
10	Kepulauan Riau	99,98	99,94	99,91	99,96	99,95	99,91	99,91	99,96	99,96	99,96
11	DKI Jakarta	100	100	99,96	99,97	99,96	99,96	99,95	99,93	99,91	99,91
12	Jawa Barat	99,93	99,98	99,96	99,99	99,98	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
13	Jawa Tengah	99,89	99,86	99,87	99,88	99,92	99,95	99,97	99,96	99,95	99,93
14	DI Yogyakarta	99,92	99,96	99,94	100	100	99,93	99,93	99,93	99,95	99,93
15	Jawa Timur	99,84	99,8	99,82	99,88	99,91	99,94	99,95	99,94	99,94	99,95
16	Banten	99,94	99,96	99,97	99,98	99,97	99,94	99,94	99,91	99,91	99,91
17	Bali	99,84	99,85	99,83	99,92	99,93	99,94	99,95	99,94	99,92	99,92
18	Nusa Tenggara Barat	99,85	99,79	99,78	99,75	99,92	99,93	99,92	99,88	99,82	99,83
19	Nusa Tenggara Timur	98,45	98,51	98,49	98,51	98,8	98,89	98,97	99,27	99,6	99,63

20	Kalimantan Barat	99,69	99,61	99,68	99,79	99,84	99,86	99,87	99,89	99,92	99,91
21	Kalimantan Tengah	99,84	99,89	99,89	99,85	99,84	99,86	99,86	99,85	99,78	99,8
22	Kalimantan Selatan	99,93	99,94	99,92	99,91	99,87	99,92	99,92	99,92	99,93	99,93
23	Kalimantan Timur	100	100	99,92	100	100	99,96	99,95	99,96	99,95	99,94
24	Kalimantan Utara	99,32	99,28	99,42	99,34	99,68	99,6	99,59	99,6	99,59	99,7
25	Sulawesi Utara	99,92	99,83	99,87	99,95	99,95	99,92	99,9	99,91	99,93	99,91
26	Sulawesi Tengah	99,58	99,52	99,54	99,68	99,81	99,8	99,82	99,82	99,81	99,82
27	Sulawesi Selatan	99,39	99,34	99,34	99,48	99,68	99,73	99,78	99,8	99,87	99,87
28	Sulawesi Tenggara	99,55	99,55	99,72	99,75	99,92	99,93	99,91	99,91	99,8	99,83
29	Gorontalo	99,57	99,61	99,73	99,84	99,86	99,87	99,87	99,85	99,78	99,76
30	Sulawesi Barat	99,31	99,27	99,26	99,41	99,49	99,47	99,5	99,52	99,58	99,6
31	Maluku	99,56	99,61	99,6	99,68	99,9	99,9	99,89	99,91	99,96	99,94
32	Maluku Utara	99,73	99,73	99,71	99,9	99,94	99,95	99,85	99,87	99,88	99,92
33	Papua Barat	99,48	99,41	99,37	99,47	99,49	99,52	99,56	99,66	99,66	99,76
34	Papua	87,11	87,12	87,51	88,44	90,39	90,78	91,13	92,04	93,57	99,69

Lampiran 4: Rata-rata Lama Sekolah

No	RATA-RATA LAMA SEKOLAH										
	Provinsi	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64
2	Sumatera Utara	9,03	9,12	9,25	9,34	9,45	9,54	9,58	9,71	9,82	9,93
3	Sumatera Barat	8,42	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28	9,44
4	Riau	8,49	8,59	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	9,22	9,32	9,43
5	Jambi	7,96	8,07	8,15	8,23	8,45	8,55	8,6	8,68	8,81	8,9
6	Sumatera Selatan	7,77	7,83	7,99	8	8,18	8,24	8,3	8,37	8,5	8,57
7	Bengkulu	8,29	8,37	8,47	8,61	8,73	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
8	Lampung	7,56	7,63	7,79	7,82	7,92	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36
9	KEP. Bangka Belitung	7,46	7,62	7,78	7,84	7,98	8,06	8,08	8,11	8,25	8,33
10	Kepulauan Riau	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,5
11	DKI Jakarta	10,7	10,88	11,02	11,05	11,06	11,13	11,17	11,31	11,45	11,49
12	Jawa Barat	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78	8,83	8,87
13	Jawa Tengah	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02
14	DI Yogyakarta	9	9,12	9,19	9,32	9,38	9,55	9,64	9,75	9,83	9,92
15	Jawa Timur	7,14	7,23	7,34	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03	8,11	8,28
16	Banten	8,27	8,37	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23
17	Bali	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54
18	Nusa Tenggara Barat	6,71	6,79	6,9	7,03	7,27	7,31	7,38	7,61	7,74	7,87
19	Nusa tengga Timur	6,93	7,02	7,15	7,3	7,55	7,63	7,69	7,7	7,82	8,02

20	Kalimantan Barat	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45	7,59	7,71	7,78
21	Kalimantan Tengah	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,64	8,65	8,73	8,81
22	Kalimantan Selatan	7,76	7,89	7,99	8	8,2	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62
23	Kalimantan Timur	9,15	9,24	9,36	9,48	9,7	9,77	9,84	9,92	9,99	10,02
24	Kalimantan Utara	8,36	8,49	8,62	8,87	8,94	9	9,11	9,27	9,34	9,35
25	Sulawesi Utara	8,88	8,96	9,14	9,24	9,43	9,49	9,62	9,68	9,77	9,84
26	Sulawesi Tengah	7,97	8,12	8,29	8,52	8,75	8,83	8,89	8,89	8,96	9,04
27	Sulawesi Selatan	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63	8,76	8,86
28	Sulawesi Tenggara	8,18	8,32	8,46	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25	9,31	9,42
29	Gorontalo	7,05	7,12	7,28	7,46	7,69	7,82	7,9	8,02	8,1	8,29
30	Sulawesi Barat	6,94	7,14	7,31	7,5	7,73	7,89	7,96	8,08	8,13	8,15
31	Maluku	9,16	9,27	9,38	9,58	9,81	9,93	10,03	10,19	10,2	10,26
32	Maluku Utara	8,37	8,52	8,61	8,72	9	9,04	9,09	9,24	9,26	9,37
33	Papua Barat	7,01	7,06	7,15	7,27	7,44	7,6	7,69	7,84	7,93	7,86
34	Papua	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65	6,69	6,76	7,02	7,15	9,82

Lampiran 5: Harapan Lama Sekolah

No	Harapan Lama Sekolah										
	Provinsi	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	13,73	13,89	14,13	14,27	14,3	14,31	14,36	14,37	14,38	14,39
2	Sumatera Utara	12,82	13	13,1	13,14	13,15	13,23	13,27	13,31	13,48	13,49
3	Sumatera Barat	13,6	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09	14,1	14,11	14,3
4	Riau	12,74	12,86	13,03	13,11	13,14	13,2	13,28	13,29	13,3	13,42
5	Jambi	12,57	12,72	12,87	12,9	12,93	12,98	13,04	13,05	13,13	13,14
6	Sumatera Selatan	12,02	12,23	12,35	12,36	12,39	12,45	12,54	12,55	12,63	12,64
7	Bengkulu	13,18	13,38	13,57	13,58	13,59	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
8	Lampung	12,25	12,35	12,46	12,61	12,63	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78
9	KEP. Bangka Belitung	11,6	11,71	11,83	11,87	11,94	12,05	12,17	12,18	12,31	12,49
10	Kepulauan Riau	12,6	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
11	DKI Jakarta	12,59	12,73	12,86	12,95	12,97	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51
12	Jawa Barat	12,15	12,3	12,42	12,45	12,48	12,5	12,61	12,62	12,68	12,8
13	Jawa Tengah	12,38	12,45	12,57	12,63	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85	12,86
14	DI Yogyakarta	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59	15,64	15,65	15,66	15,7
15	Jawa Timur	12,66	12,98	13,09	13,1	13,16	15,59	13,36	13,37	13,38	13,43
16	Banten	12,35	12,7	12,78	12,85	12,88	12,89	13,02	13,05	13,09	13,1
17	Bali	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48	13,58	13,62
18	Nusa Tenggara Barat	13,04	13,16	13,46	13,47	13,48	13,7	13,9	13,96	13,97	13,98
19	Nusa tengga Timur	12,84	12,97	13,07	13,1	13,15	13,18	13,2	13,21	13,22	13,23

20	Kalimantan Barat	12,25	12,37	12,5	12,55	12,58	12,6	12,65	12,66	12,67	12,68
21	Kalimantan Tengah	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57	12,66	12,74	12,75	12,76	12,77
22	Kalimantan Selatan	12,21	12,29	12,46	12,5	12,52	12,68	12,81	12,82	12,86	12,87
23	Kalimantan Timur	13,18	13,35	13,49	13,67	13,69	13,72	13,81	13,84	14,02	14,03
24	Kalimantan Utara	12,54	12,59	12,79	12,82	12,84	12,93	12,94	13,06	13,2	13,21
25	Sulawesi Utara	12,43	12,55	12,66	12,68	12,73	12,85	12,94	12,95	12,96	12,97
26	Sulawesi Tengah	12,72	12,92	13,04	13,13	13,14	13,17	13,23	13,32	13,33	13,34
27	Sulawesi Selatan	12,99	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53	13,54	13,55
28	Sulawesi Tenggara	13,07	13,24	13,36	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69	13,7	13,71
29	Gorontalo	12,7	12,88	13,01	13,03	13,06	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17
30	Sulawesi Barat	12,22	12,34	12,48	12,59	12,62	12,77	12,86	12,87	14,08	12,89
31	Maluku	13,56	13,73	13,91	13,92	13,94	13,96	13,97	14	12,88	14,09
32	Maluku Utara	13,1	13,45	13,56	13,62	13,63	13,67	13,68	13,73	13,74	13,75
33	Papua Barat	12,06	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13	13,21	13,34	13,17
34	Papua	9,95	10,23	10,54	10,83	11,05	11,08	11,11	11,14	11,15	13,72

Lampiran 6: Hasil Analisis Uji Penelitian

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.722912	(34,303)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.582964	34	0.0000

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: CHOW

Test cross-section random effects

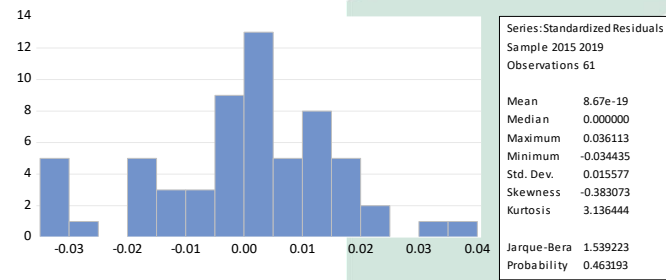
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.191387	2	0.0037

3. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	C	X	Z
Mean	0.667800	1.000000	9.814500	121.1944
Median	0.683500	1.000000	9.045000	121.4250
Maximum	0.898000	1.000000	20.03000	125.5500
Minimum	0.245000	1.000000	2.280000	103.0500
Std. Dev.	0.132923	0.000000	3.281161	2.776411
Skewness	-1.247240	NA	0.643856	-3.741775
Kurtosis	4.415363	NA	2.968826	22.31715
Jarque-Bera	116.5305	NA	23.50496	6079.710
Probability	0.000000	NA	0.000008	0.000000
Sum	227.0520	340.0000	3336.930	41206.11
Sum Sq. Dev.	5.989626	0.000000	3649.680	2613.167
Observations	340	340	340	340

4. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinieritas

	X	Z
X	1.000000	0.268972
Z	0.268972	1.000000

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.640202	Prob. F(2,187)	0.5930
Obs*R-squared	2.003948	Prob. Chi-Square(2)	0.5717
Scaled explained SS	1.309449	Prob. Chi-Square(2)	0.7270

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 07/14/25 Time: 20:00

Sample: 1 340

Included observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.325311	0.052163	5.551234	0.0000
X	-0.003538	0.001202	-2.308613	0.0564
Z	0.005132	0.002724	2.437868	0.0589

d. Uji Autokorelasi

Root MSE	0.106016	R-squared	0.752003
Mean dependent var	0.667800	Adjusted R-squared	0.731550

S.D. dependent var	0.132923	S.E. of regression	0.112117
Akaike info criterion	-3.438697	Sum squared resid	3.821363
Schwarz criterion	-3.033279	Log likelihood	280.5785
Hannan-Quinn criter.	-3.277155	F-statistic	4.928326
Durbin-Watson stat	1.966044	Prob(F-statistic)	0.000000

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/25 Time: 21:07

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.616443	0.037148	16.59417	0.0000
X	0.005233	0.003730	3.403069	0.0014

b. Koefisien Determinasi (R2)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/25 Time: 21:25

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.030242	0.653206	6.169943	0.0000
X	0.005978	0.003581	2.669455	0.0011
Z	-0.028228	0.005393	-5.234020	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.106016	R-squared	0.752003
Mean dependent var	0.667800	Adjusted R-squared	0.731550
S.D. dependent var	0.132923	S.E. of regression	0.112117
Akaike info criterion	-3.438697	Sum squared resid	3.821363
Schwarz criterion	-3.033279	Log likelihood	280.5785
Hannan-Quinn criter.	-3.277155	F-statistic	4.928326
Durbin-Watson stat	1.966044	Prob(F-statistic)	0.000000

c. Uji Moderasi

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/25 Time: 22:27

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.570296	2.156461	0.264459	0.5716
X	0.438789	0.257185	1.706120	0.0000
Z	0.000315	0.017792	0.017721	0.0004
XZ	-0.003563	0.002117	-2.683039	0.0000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riska Putri Ayu, Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Pendidikan sebagai Variabel Moderasi di Indonesia” memiliki nama lengkap Riska Putri Ayu, lahir di Pongko pada tanggal 19 November 2003. Anak ke empat dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Haripuddin dan Ibu Suarni. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal pertamanya di SD Negeri 196 Batang Tongka (2008-2014). Jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Bone-Bone (2014-2017). Jenjang sekolah menengah akhir di SMAN 4 Luwu Utara (2017-2020) yang beralamatkan di Desa Pongko, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan Strata-1 di program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2025. Motto hidup “Barang siapa yang memberatkan (menyusahkan) seorang Muslim, maka Allah SWT juga akan memberatkannya.” Dapat dihubungi ke email riskaputriayu@gmail.com.